



UNIVERSITAS INDONESIA

KESETARAAN MASYARAKAT PLURALIS DEMOKRASI
Sebuah Analisa Filosofis atas Pemikiran Jacques Rancière

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Filsafat

SHANE ANTOINETTA CHRISTY HEHAKAYA
NPM 0806466102

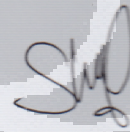
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN DAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
DEPOK
JULI 2012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 9 Juli 2012



Shane Antoinetta Christy Hehakaya



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

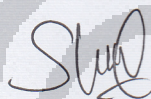
Skripsi ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Shane Antoinetta Christy Hehakaya

NPM : 0806466102

Tanda Tangan

: 

Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

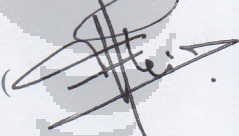
Nama : Shane Antoinetta Christy Hehakaya
NPM : 0806466102
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : Kesetaraan Masyarakat Pluralis Demokrasi
Sebuah Analisa Filosofis atas Pemikiran Jacques
Rancière

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Budiarto Danujaya ()

Penguji : Dr. Donny Gahral Adian ()

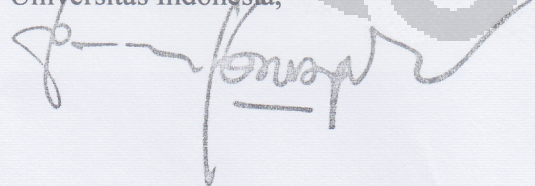
Penguji : Fristian Hadinata, M.Hum ()

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia,



Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Haleluya.. terima kasih Tuhan Yesus akhirnya skripsi ini selesai juga. Lega, kata yang tepat menggambarkan bagaimana rasanya jadi sarjana. Senang, walaupun sebenarnya filsafat bukanlah *passion* saya, *but I'm willing to take the risk for what I've choosen*. Pada mulanya penulisan skripsi mengalami berbagai kendala, terutama pada saat si “hmm sempat ga ya?” ini datang menghampiri. Akan tetapi, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini pun akhirnya bisa juga diselesaikan. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak di bawah ini yang sangat berperan dalam kehidupan saya, khususnya selama masa perkuliahan saya di Universitas Indonesia.

Terima Kasih kepada **Bapak Budiarto Danujaya** selaku pembimbing skripsi saya. Begitu banyak pelajaran yang saya dapatkan selama bimbingan dengan beliau. Walaupun bimbingan hanya dilakukan seminggu sekali, tapi dengan penuh dukungan dari beliau ini berhasil membuat saya untuk tetap terus semangat menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas. *Mohon maaf Pak, kalau saya susah dibilangin atau seringkali membuat Bapak pusing akibat perubahan yang sering saya lakukan dalam penulisan skripsi saya. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan problem politik yang sudah Bapak berikan untuk saya. You're the best thesis guide for me.*

Terima kasih kepada **Bapak Naupal** selaku pembimbing akademis saya selama empat tahun menjadi mahasiswi filsafat. Walaupun saya jarang sekali konsultasi masalah perkuliahan, tapi saya tetap ingin mengucapkan *terima kasih Pak telah menjadi pembimbing akademis yang sangat baik dan friendly untuk saya.*

Terima kasih kepada **Bapak Donny Gahril Adian** dan **Bung Fristian Hadinata** selaku penguji skripsi saya. *Terima kasih untuk semua pengetahuan baru yang telah diberikan demi menunjang penulisan skripsi saya ini.* Dari kedua orang inilah saya menjadi lebih paham akan pemikiran seorang Jacques Rancière.

Terima kasih kepada semua **pengajar Filsafat Universitas Indonesia**. *Terima kasih untuk semua pengetahuan baru yang telah diberikan selama 4 tahun*

saya menuntut ilmu di jurusan ini. Terima kasih atas segala kebaikan serta kesabaran yang tak henti-hentinya diberikan oleh kalian semua. Terima kasih, karena kalian semua juga lah saya menjadi lebih kritis.

Terima kasih kepada **Bung Robertus Robet**. *Terima kasih ya Bung sudah memberikan buku-buku Jacques Rancière yang sangat amat diperlukan dalam penulisan skripsi saya ini.*

Terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya setiap hari, yang berhasil membuat saya yakin bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Untuk papa, **Samuel Petrus Hehakaya**, *terima kasih papa untuk kasih sayang, dukungan, serta semangatnya buat aku selama hampir 22 tahun ini.* Untuk mama, **Diana Tudang Hehakaya**, *terima kasih ma' untuk selalu mengingatkan aku supaya jadi perempuan yang baik. Jangan pernah berhenti doakan aku terus ya, supaya bisa jadi anak perempuan kalian yang sukses dan membanggakan keluarga, love you both.* Untuk kakak terbaikku sepanjang masa, **Moses Eljames Christy Hehakaya**, *terima kasih untuk semuanya kakak, terutama bantuannya dalam hal per-laptop-an.* Untuk Opa, *terima kasih Opa, karena kata-kata Opa, "Opa ingin melihat kamu nanti besarnya jadi apa" inilah aku semangat menyelesaikan skripsiku.* Para **Tante, Om**, serta **Adik-adik sepupu** yang selalu memberikan dukungan dalam hal apapun, *terima kasih atas perhatian kalian semua, maaf ya kalau aku suka kurang perhatian dan suka bandel. Semoga kelulusanku ini bisa membuat kalian semua bangga.*

Terima kasih untuk **Axel Sahatma Pohan**, *terima kasih atas segala bantuan serta doanya untuk aku. Terima kasih untuk "Kamu pasti bisa!"nya.* *Terima kasih untuk selalu pasang badan jadi tempat pelampiasan stress selama masa perskripsian ini. Thank you, dear, for always being here by my side through it all.*

Terima Terima kasih untuk **teman-teman Filsafat 2008** yang amat sangat baik walaupun suka mencar-mencar entah kenapa susah banget ngumpulin semuanya, *tetap semangat ya teman-teman seperjuangan!* Untuk **Khoirunnisa Mi'rojiah, Sistha Widyaesmi Haryopranoto, Steffi Magdalena Jayanti**, terima kasih telah menjadi sahabat terbaikku selama 4 tahun ini. *Thank you so*

*mucho mucho lads' untuk gosip tawa-tiwinya di sore hari sambil menikmati segelas kopi di coffee toffee, I'm so so happy that I have you as my bestfriend in college. Untuk **Hario Susanto**, ketua angkatan 2008, thanks yo' atas bantuannya selama 4 tahun ini, walaupun kadang komentar lo suka jahat dan minta disinggung tapi lo gemar membantu kok hahaha tetap semangat ya meraih restu ya, lah? Untuk geng kansas, **Sona**, terima kasih ya son' tebengan pulangnyanya. Untuk **Yasin**, terima kasih 'sin bantuan via diskusi langsung maupun via BBM menjelang pra sidang dan sidang skripsi gue. Untuk **Agung**, terima kasih lho agung udah mau ikutan diskusi walaupun endingnya jadi curhat haha cepet lah selesaikan apa yang sudah lo mulai. **Daru, Bayu, Pepeng, Boni, Melysha, Sopa, Agrita, Erby, Doni**, terima kasih teman-teman semua untuk obrolan-obrolan yang sangat menghibur, mulai dari yang penting sampai tidak penting, terutama untuk ketawa-ketawanya. Untuk **Bella**, teman pertama mulai dari kumpul junior di balairung dulu, teman senasib yang awalnya sama-sama merasa salah jurusan, berteman sama bella itu sangat menghibur, tetap semangat jo ngana, supaya tetap makan enak! Untuk **Abby, Yuwita, Nurul, Metha, Okvi, Santi, Lia, Asty, Dadah, Nata, Irsyad**, berteman sama kalian kadang bikin gue ketar-ketir panik karena kalian begitu rajinnya tapi sekaligus bikin gue termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Untuk **Ajeng, Indah, Ismi**, terima kasih untuk bantuan dan dukungan kalian bertiga, serta gosip-gosip terbaru yang kalian bagikan. Untuk **Ranggi, Dela, Levita, Willy, Arfan, Ikung, Boone, Vani, Didi, Rudi**, dan **Rasyid**, terima kasih telah menjadi teman seangkatanku di kampus. Untuk semua teman-teman angkatan 2008.. *I'm gonna miss you, guys!**

Terima kasih untuk geng SMP yang sekaligus menjadi sahabat terbaikkku sampai saat ini, **Shera Ditriya Bastian**, pasangan sandal jepitku yang selalu siap siaga membantu dalam hal apapun, *terima kasih ea' untuk persahabatan kita sampai saat ini, untuk saran dan kritiknya, untuk tempat berkeluh kesahnya, you're the bestfriend that I ever had!* Untuk **Ajeng Gusvidyandra, Bobby Permana, Airlangga Dwi Putra, Azhar Fuadi**, dan **Reno Andry**, terima kasih banget untuk obrolan masa depannya yang selalu memotivasi gue untuk mulai 'bergerak' meraih kesuksesan, *tetap semangat! Kita harus sukses bareng-bareng ya!*

Terima kasih untuk geng SMA, **Angrianna Angguningtyas**, **Anna Annisa**, *terima kasih untuk conference BBM-nya ya ceu', untuk obrolan serta gosip-gosip yang selalu memunculkan tawa dikala pusing menghadapi perskripsian ini, yuk semangat meraih jodoh terbaik!* Untuk **Nadia Oktaviani**, **Meita Nurhaida**, **Veby Citra**, **Sella Aranti**, *terima kasih untuk pertemanan kita sampai saat ini.* Untuk **Satrio Bantarpraci**, *terima kasih 'koy, selalu mengingatkan gue untuk fokus skripsi supaya bisa lulus bareng tepat 4 tahun.. love you all!*

Terima kasih untuk **Frisca Putri Pratama**, sahabat rempongku, *terima kasih atas persahabatannya sampai saat ini walaupun terkadang kamu senang sekali memberikan ajakan jalan-jalan yang menggoda iman keteguhanku dalam mengerjakan skripsi, terima kasih untuk pengertiannya capu, maaf ya aku terkesan sombong selama masa perskripsianku.* Untuk **Sarah Nadia Nasution**, *terima kasih 'cal untuk dukungan serta hiburan jalan-jalannya.* Untuk **Ezra**, **Baim**, dan **Arsy**, *terima kasih atas dukungan serta partisipasi aktif kalian turut hadir sebagai tim pelengkap meramaikan sesi bergosip, salam "chibi chibi chibi ha ha ha haaaaa!"* Untuk **Winnie**, *terima kasih wincew sudah bersedia meluangkan waktunya dirempongin pertanyaan-pertanyaan seputar skripsi.* Untuk **Mas Dimas**, *terima kasih ya mas dimas untuk diskusi bareng menjelang pra sidang yang sangat amat membantu.* Untuk **Angel**, *terima kasih ya 'ngel atas bantuannya dalam skripsi ini.* Untuk **Varend Pietra**, *my USA boy, thank you so much 'rend atas bantuan jarak jauhnya, sukses ya S2-nya supaya cepet pulang ke tanah air tercinta.* Untuk **Amal**, **Vinny**, **Renath**, **Andini**, **Radin**, **Nanda**, **Hilda**, **Lady**, **Ncud**, **Mimin**, **Rizko**, **Bibiw**, dan **Benny**, *terima kasih teman-teman, senang rasanya mempunyai teman seperti kalian.* Terima kasih untuk semua pihak, baik keluarga, teman, atau siapapun yang tidak dapat atau luput disebutkan satu persatu, terima kasih, bantuan serta dukungan kalian semua sangat berarti.

Akhir dari kata pengantar ini, terima kasih untuk mama, **Jeane Melly Munthe**. Untuk Oma, **Johanna Frans Siwabessy**. Untuk Tante, **Sondang Herlina Munthe**. *Terima kasih untuk kasih sayang, perhatian, dan peran kalian dalam hidupku. I sending my pray, love, hug, and kiss up to heaven for all of you.*

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shane Antoinetta Christy Hehakaya
NPM : 0806466020
Program Studi : Ilmu Filsafat
Departemen : Ilmu Filsafat
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kesetaraan Masyarakat Pluralis Demokrasi
Sebuah Analisa Filosofis atas Pemikiran Jacques Rancière

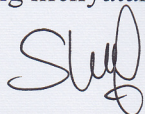
Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok

Pada tanggal 9 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Shane Antoinetta Christy Hehakaya)

ABSTRAK

Nama : Shane Antoinetta Christy Hehakaya
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : Kesetaraan Masyarakat Pluralis Demokrasi
Sebuah Analisa Filosofis atas Pemikiran Jacques Rancière

Skripsi ini merupakan telaah filosofis terhadap sistem demokrasi dalam masyarakat pluralis saat ini, yang mana kondisi di dalamnya terjadi penyingkiran subyek sehingga menjadi subyek ‘bagian yang tak memiliki bagian’. Hal ini memberikan celah bagi terjadinya kesalahan hitung yang memunculkan kondisi ketidaksetaraan. Praktik-praktik polis dalam masyarakat, melalui logika polisinya memunculkan distribusi sensibilitas yang mengklasifikasikan subyek-subyek di dalam sistem. Adanya pengklasifikasian dalam hal apapun menurut Rancière merupakan kondisi ketidaksetaraan. Menanggapi masalah ketidaksetaraan ini, terdapat solusi yang berpotensi memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara subyek berada dalam posisi politiknya untuk berpartisipasi secara aktif dalam merebut kesetaraannya. Tindakan politik yang dapat dilakukan subyek adalah dengan melalui disensus yang berwujud pada deklasifikasi. Terkait dengan permasalahan di atas, polis juga tidak dapat begitu saja dihilangkan, namun cara yang dapat dilakukan adalah dengan terus menerus mengungkap apa yang tersembunyi di dalam polis. Disensus sebagai jalan untuk mengkonfrontasi partisi sensibilitas dengan cara berpartisipasi aktif sebagai subyek politik untuk merebut kesetaraan. Upaya ini merupakan bentuk politik demokratisasi sebagai proses disensus. Tulisan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali akan pentingnya menyertakan seluruh subyek dalam sistem demokrasi, sehingga setiap subyek dapat mencapai kesetaraannya secara aktif. Aspirasi yang diperjuangkan pada tulisan ini merupakan suatu kritik terhadap sistem demokrasi yang menyingkirkan subyek-subyek di dalam sistem.

Kata kunci : Demokrasi, Masyarakat Pluralis, Ketidaksetaraan, Polis, Politik, Partisi Sensibilitas, Disensus, Kesetaraan.

ABSTRACT

Name : Shane Antoinetta Christy Hehakaya
Major : Philosophy
Title : Equality of Pluralist Democracy Society
A Philosophical Analysis on the Thought of Jacques Rancière

This thesis is an exploration of philosophical about democracy system in the pluralist society today, in which the elimination of subject occurs. Therefore, this would be the subject that is called “the part that has no part”. The calculation error might arise and this also could lead to the inequality. Moreover, the police practice in society that exists through its policy of logic will lead to the distribution of the sensibility of subject classification in the system. According to Rancière, inequality will occur whenever classification exists in whatever situation. In regards to the inequality, there is an alternative that could potentially solve this issue. This could be solved if the subject in their political position participates actively in gaining their equality. For instance, subject can do a tangible dissensus in declassification. In this case, it does not necessarily mean that a police could be removed. It would be better if we do investigation frequently to reveal something that is hidden in the police. Dissensus is a way to confronting partition of the sensibility through the active participation in achieving equality as a political subject. These efforts are form of political democracy as a dissensus process. This thesis aims to remind us about the importance of including the entire subject in the democracy system, and thus, every subject can achieve its equality actively. The aspiration in this thesis is a criticism toward democracy system that eliminates subjects in the system.

Key words : Democracy, Pluralist Society, Inequality, Police, Politics, Partition of the Sensibility, Dissensus, Equality.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. <i>Thesis Statement</i>	6
1.4. Tujuan Penulisan	7
1.5. Metode Penulisan	7
1.6. Kerangka Teori	7
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB 2 MASYARAKAT PLURALIS DEMOKRASI	12
2.1. Pluralisme	12
2.1.1. Masyarakat Pluralis	14
2.2. Demokrasi	16
2.2.1. Demokrasi Saat Ini	17
2.2.2. Ketidaksetaraan dan Kesetaraan	25
BAB 3 KONSEP KESETARAAN JACQUES RANCIÈRE	27
3.1. Latar Belakang Jacques Rancière	27
3.1.1. <i>Archipolitics, Metapolitics, Parapolitics</i>	28
3.2. Konsep Ketidaksetaraan dan Kesetaraan Menurut Jacques Rancière	32
3.2.1. Kesetaraan Aktif (<i>Active Equality</i>)	33
3.2.2. Kesetaraan Pasif (<i>Passive Equality</i>)	34
3.2.3. <i>Le Part Sans – Part</i> (Bagian yang tak Memiliki Bagian)	35
3.3. <i>Polis versus Politik</i>	37
3.4. Pembongkaran Rezim Partisi dalam Masyarakat Pluralis	44
3.4.1. Disensus terhadap Sistem	47
3.4.2. Deklasifikasi sebagai Wujud Disensus	48
BAB 4 PENUTUP	52
4.1. Kesimpulan:	
Demokratisasi Masyarakat ‘Bagian yang tak Memiliki Bagian’	52
4.2. Sumbangan Teori Terhadap Situasi di Indonesia	53
4.3. Refleksi Kritis	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses demokrasi dan penegakan hukum telah cukup banyak mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan era sebelumnya. Demokrasi menjadi bentuk pemerintahan favorit pilihan masyarakat majemuk saat ini. Demokrasi pertama kali diperkenalkan sebagai pemerintahan yang memunculkan rakyat sebagai penguasa negara ialah di negara kota Yunani Kuno, yaitu Athena. Istilah demokrasi diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Pada masa itu, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi langsung, yang mana rakyat mengambil peran langsung dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh negara tersebut dan terkait pula dengan tindakan-tindakan politiknya. Saat ini, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi perwakilan. Sistem demokrasi perwakilan ini bahwa rakyat memilih beberapa orang untuk dijadikan wakil mereka untuk duduk di kursi pemerintahan.

Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling cocok mengakomodir pluralisme. Pluralisme, sebuah doktrin yang bertentangan dengan monisme dan dualisme, memegang realitas yang terdiri dari banyak hal. Kita mampu membangun melalui penggunaan berbagai sistem konsep dan standar-standar yang berbeda pengukurannya. Terkadang, pluralisme juga berarti realitas yang tidak memiliki kesatuan dasar atau kontinuitas, tetapi pada dasarnya terfragmentasi atau tak tentu. Mengutip dalam Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Ayer mengatakan bahwa, *“The extreme form of pluralism is the assumption that all relations are external, with the consequence that the existence of any one object is logically independent of the existence of any other”* (Bentuk ekstrim dari pluralisme adalah asumsi bahwa semua hubungan bersifat eksternal,

dengan konsekuensi bahwa keberadaan obyek satu secara logis bebas dari keberadaan yang lain).¹

Secara umum, pluralisme dapat dipahami sebagai keadaan masyarakat yang majemuk, yang berkaitan dengan sistem sosial dan politiknya. Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Pluralisme adalah salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dan perkembangan ekonomi. Mengkaji pluralisme tidak bisa dilepaskan dari permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, serta tingkat dan mutu produktivitas. Pluralisme tidak menetapkan batas-batas bagi ideologinya sendiri, namun ia akan selalu terbuka, luwes, dan mampu mengakomodasi setiap perbedaan di dalam kemajemukan. Komponen-komponen yang membentuk kemajemukan tersebut seharusnya tidak dipahami sebagai esensi yang statis, melainkan sebagai rangkaian proses yang dinamis. Hubungan antar komponen juga tidak selalu harus harmonis dan selaras, namun pluralisme justru menuntut kesiapan mental kita untuk berhadapan dengan bentuk hubungan yang berpotensi terciptanya konflik, dan belajar mengelola konflik tersebut dengan sikap toleran dan bijaksana.

Masyarakat pluralis tentu memiliki keragaman mendasar di dalamnya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang disadari atau tidak telah menimbulkan kelompok-kelompok yang diklasifikasi dalam kotak-kotak sesuai dengan identitas yang ada di dalam dirinya masing-masing. Pengklasifikasian ini seringkali menimbulkan perlakuan-perlakuan yang mendiskriminasikan subyek lain yang dianggap tidak sama dengan kelompoknya. Menurut buku *A Modern Dictionary Of Sociology* karya George A. Theodorson dan Achilles G.

¹Bunnin, Nicholas, dan Jiyuan Yu. *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. Hlm. 534.

Theodorson, diskriminasi memiliki arti yaitu perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok yang didasarkan pada sesuatu. Biasanya bersifat kategoris atau atribut-atribut khas, seperti ras, kesuku-bangsaan, agama, maupun keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya digunakan untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas, dalam hubungannya dengan pihak minoritas, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak mencirikan demokrasi. Didasarkan pada pengertian tersebut, diskriminasi bersifat aktif, atau aspek yang dapat terlihat (*overt*) dari prasangka yang negatif (*negative prejudice*) terhadap seorang individu atau suatu kelompok. Diskriminasi mencakup perilaku apa saja berdasarkan perbedaan yang terjadi secara alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu ataupun jasanya. Selain itu, diskriminasi juga merupakan penyangkalan hak-hak sekelompok warga negara yang seharusnya berlaku bagi segenap warganya. Contohnya antara lain yaitu hambatan dalam memasuki suatu institusi tertentu seperti bekerja dalam pemerintahan, militer, perguruan tinggi negeri, baik praktik-praktik yang bersifat resmi maupun tidak.

Salah satu contoh di negara Indonesia yang sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, serta telah mempunyai Undang-undang Dasar 1945 yang pada bab X tentang 'Warga Negara' pasal 27 ayat 1 yang menganggap semua warga negara Indonesia memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian. Pada ayat 2 mengatakan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, ketidaksetaraan masih saja terus muncul dan menjadi kecacatan dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Sebagai contoh, yaitu pendiskriminasian yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pribumi terhadap kelompok masyarakat Tionghoa, terutama pada peristiwa Mei 1998. Dimana pada saat itu terlihat aksi pendiskriminasian yang dilakukan oleh kelompok pribumi terhadap kelompok Tionghoa. Terjadinya kerusuhan Mei 1998 yang entah disulut secara sengaja atau tidak telah memberikan kesempatan pelampiasan kecemburuan, prasangka, kebencian serta kemarahan terpendam

yang dilakukan oleh kelompok pribumi terhadap kelompok Tionghoa. Kelompok masyarakat pribumi, sebagai orang-orang yang merasa asli suku bangsa Indonesia dan merupakan kelompok mayoritas, dan kelompok masyarakat tionghoa yang juga menjadi penduduk Indonesia namun karena mereka adalah warga keturunan maka mereka menjadi kelompok minoritas. Contoh di negara lain seperti pendiskriminasian dalam kehidupan sosial yang diterima oleh kelompok kulit hitam di Amerika Serikat atau warga dengan nama-nama islami dilarang masuk ke Amerika Serikat. Selain kasus di atas, terdapat pula beberapa contoh lainnya, yaitu seperti pendiskriminasian terhadap kaum penyandang cacat, kaum miskin, bahkan kaum perempuan pun juga mendapat perlakuan yang mendiskriminasikan mereka terutama dalam ruang publik. Contoh salah satu alasan yang menjadi penyebab terjadinya pendiskriminasian terhadap kaum perempuan ini adalah akibat adanya penstereotipan dalam masyarakat terhadap kaum perempuan, yaitu kaum perempuan dianggap tidak mampu bersaing di ruang publik. Karena kodrat perempuan sejatinya hanyalah mengurus hal-hal di dalam ranah domestik, mengurus rumah dan keluarga. Diskriminasi terhadap beberapa kelompok yang dianggap lebih lemah itu harus segera dihilangkan, karena diskriminasi adalah bentuk ketidakadilan yang menyangkut penyangkalan terhadap hak-hak asasi warga lain sebagai warga negara yang berkedudukan sama dalam hak serta kewajibannya.

Demokrasi saat ini merupakan sistem pemerintahan dimana keputusan kebijakan yang diambil didasarkan pada hasil keputusan suara mayoritas. Kekuasaan suara mayoritas ini seharusnya juga dibarengi dengan penjaminan akan hak asasi manusia yang berfungsi melindungi hak-hak subyek minoritas, sehingga demokrasi tidak lemah bila dihadapkan dengan undang-undang atau hukum serta norma yang berlaku. Hak-hak subyek minoritas tidak bergantung pada niat baik dari subyek mayoritas dan seharusnya juga tidak dapat dihilangkan dengan suara terbanyak. Hak-hak subyek minoritas dilindungi karena undang-undang dan institusi demokratis melindungi hak semua warga negara. Melihat kenyataan perkembangannya saat ini, keragaman identitas yang ada dalam masyarakat pluralis, pelbagai hukum, dan kebijakan yang telah dibuat nyatanya belum cukup mampu mengatasi persoalan konflik-konflik yang terjadi yang pada

akhirnya bermuara dalam situasi dan kondisi yang tidak setara. Contohnya, salah satunya negara Indonesia yang merupakan salah satu negara penganut sistem pemerintahan demokrasi sejak lama, bahwa di dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah (Perda), telah terlihat penjaminan bagi setiap hak dan kewajiban warga Negara. Akan tetapi ada beberapa hal yang dianggap menjadi ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia saat ini adalah keragaman Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA). Dilihat dari sisi lain, keragaman SARA merupakan aset bagi suatu bangsa untuk dapat mengembangkan kebudayaan serta pemahamannya agar lebih dinamis. Saat aset tersebut malah dianggap sebagai sebuah virus yang harus dibasmi, maka sebuah bangsa tidak mempunyai modal lagi untuk tumbuh menjadi bangsa majemuk yang menghargai nilai-nilai keragaman yang ada. Keragaman yang seharusnya menjadi modal sosial nyatanya malah membuahkan konflik hierarki bahkan penyingkiran kelompok lain yang dianggapnya tidak 'sama'. Penstereotipan dari identitas subyek ini juga turut menjadi penyebab adanya konflik hierarki kelas dalam masyarakat. Beberapa contoh penstereotipan yang mengakibatkan munculnya hierarki antara lain, antara kaum borjuis dan kaum proletar, dimana mereka mendapatkan perlakuan serta akses-akses yang berbeda untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, atau antar pekerja dalam ruang publik dan pekerja dalam ruang privat yang ditandai dengan perbedaan hak-hak yang didapat seringkali lebih merugikan para pekerja ruang privat. Mereka di atas adalah beberapa contoh dari kelompok-kelompok yang mengalami perlakuan yang mendiskriminasikan mereka karena disingkirkan dari sistem akibat perbedaan identitas, dan klasifikasi yang ada di dalam sistem belum menghitung mereka sebagai bagian dari sistem.

Berangkat dari fenomena di atas, masyarakat mayoritas memiliki peluang untuk mendominasi arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam masyarakat yang demokratis, kekuasaan mayoritas juga harus dibarengi dengan jaminan hak asasi manusia yang berfungsi melindungi hak minoritas. Negara juga perlu berperan dalam menstarakan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Peran negara seharusnya dapat menjamin kebebasan setiap warganya. Negara harus dapat berdiri diatas setiap kelompok masyarakat,

Universitas Indonesia

baik kelompok mayor sebagai kelompok yang dominan, maupun kelompok minor sebagai kelompok yang kerap kali mendapat perlakuan diskriminatif, sebab dimana ada kelompok mayor yang dominan, tentu terdapat pula kelompok minor yang termarjinalkan. Semua kelompok di dalam masyarakat pluralis seharusnya mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama untuk tumbuh serta mengembangkan dirinya di masyarakat. Sikap toleransi antar setiap individu, terutama antar kelompok, sangat dibutuhkan. Sikap toleransi ini harus dilakukan antar individu maupun kelompok, untuk menghindari terciptanya konflik dalam masyarakat.

Menurut penulis, masalah ketidaksetaraan ini menjadi penting. Dalam sistem demokrasi setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan, dan hak tersebut pun harus dihormati oleh segenap lapisan masyarakat. Selain dua cara di atas, jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dan peran pemerintah, sistem demokrasi harus mengembalikan subyek 'bagian yang tak memiliki bagian' dalam sistem sebagai agar dapat berpartisipasi aktif sebagai 'subyek' politik. Oleh karena permasalahan di atas, penulis menawarkan pemikiran dari Jacques Rancière mengenai konsep kesetaraan dan politik demokrasi disensus sebagai jalan keluar membongkar rezim partisi dalam masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Ketidaksetaraan timbul akibat penyingkiran mereka yang masuk ke dalam 'bagian yang tak memiliki bagian' atau mereka yang tersingkirkan di dalam masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan sistem demokrasi, karena bahwasanya demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling cocok dalam mengatasi pluralisme. Kesetaraan seharusnya dicapai dengan menghadirkan mereka yang tersingkirkan kembali pada posisi aktifnya sebagai subyek politik sehingga kesalahan hitung di dalam demokrasi pun tidak akan terjadi.

1.3. Thesis Statement

Ketidaksetaraan di dalam masyarakat pluralis muncul karena kesalahan sistem demokrasi. Dengan berpartisipasi aktif, mereka yang masuk ke dalam

‘bagian yang tak memiliki bagian’ kembali menduduki posisi aktifnya, maka kesetaraan dapat tercapai bagi segenap subyek dalam masyarakat.

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memberikan solusi pada permasalahan ketidaksetaraan yang terjadi di dalam masyarakat modern saat ini yang ditelaah melalui konsep *politic* dan *the police* dari Jacques Rancière. Konsep dari Rancière tersebut diharapkan dapat meruntuhkan partisi-partisi sosial di dalam masyarakat serta merubah paradigma kesetaraan yang selama ini mendominasi pemikiran masyarakat demokrasi. Bahwasanya, kesetaraan bukanlah sebuah tujuan yang ingin dicapai, melainkan kesetaraan sudah merupakan modal awal yang dimiliki oleh setiap individu yang harus tetap dipertahankan.

1.5. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian penelusuran studi literatur dan analisis kritis. Analisa kritisnya pada problem kesetaraan di dalam masyarakat pluralis demokrasi. Penulis menggunakan pemikiran Jacques Rancière tentang konsep kesetaraannya melalui pemikiran tentang *politics* dan *police* sebagai analisis permasalahan adanya hierarki dan partisi sosial di dalam masyarakat pluralis. Buku yang penulis gunakan sebagai bahan bacaan utama untuk menunjang penulisan proposal ini adalah *Dis-agreement: Politics and Philosophy* (Jacques Rancière, 1998), *Dissensus* (Jacques Rancière, 2010), serta bahan bacaan lainnya sebagai bahan bacaan sekunder yang mendukung penulisan skripsi ini.

1.6. Kerangka Teori

Penulis menggunakan pemikiran dari Jacques Rancière sebagai landasan pemikiran teori dalam proposal ini. Alasan penulis memilih Rancière dan bukan yang lain ialah dikarenakan ketertarikan penulis terhadap pemikirannya yang aktual dan memiliki penalaran yang cukup kuat. Rancière dikenal sebagai murid

Althusser.² Dan bersama Althusser, ia menulis sebuah buku yang hingga kini sangat terkenal dan berpengaruh dalam pemikiran Marxist *Reading Capital* (1965)³. Di dalam pemikirannya, Rancière banyak berbicara tentang subyek-subyek atau kelompok yang mengalami ketidaksetaraan, yang mana ia sebut dengan istilah ‘bagian yang tak memiliki bagian’ (*the part that has no part*)⁴. Pertama-tama, ia memulai filsafat politiknya dengan memberikan kritik atas filsafat yang dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, dan Karl Marx, yang banyak sekali menyoroti figur kaum miskin. Dari ketiga pemikiran filosofis yang berkembang dalam sejarah filsafat barat tersebut, Rancière memberikan kritiknya terhadap filsafat-filsafat politik yang lampau, yang terbagi ke dalam tiga jenis yaitu ‘*archipolitics*’, ‘*metapolitics*’ dan ‘*parapolitics*’.

Archipolitics adalah model filsafat politik yang dimulai oleh Plato. Di dalam *Archipolitics* tidak ada kesetaraan. *Politics* (Politik; sebagaimana seperti yang dibahasakan oleh Rancière) tidak muncul karena setiap orang sudah diposisikan secara terstruktur pada tempat dan posisi yang ‘diharapkan’ sehingga tidak membuka celah untuk mencapai kesetaraan. Kedua, yaitu *parapolitics*. *Parapolitics* mendapatkan pendasarannya dari Aristoteles yang dipandang sedikit lebih ‘demokratis’. Politik di dalam *parapolitics* dipandang sebagai persoalan estetika. Di dalam *parapolitics*, politik dibuat lebih lunak, seperti politik konsensus. Yang ketiga adalah *metapolitics* yang berakar dalam pikiran Marxist. Menurut Rancière, *metapolitics* pada dasarnya adalah bentuk pengingkaran terhadap ‘*politics*’ karena kebenaran akan politik sering ditempatkan atau dicari jauh melampaui politik.

Secara umum Rancière membedakan dua jenis politik, yakni *politics* (politik) dan *police* (polis). Polis bagi Rancière dipahami sebagai praktik kekuasaan atau penubuhan kehendak serta kepentingan yang mensyaratkan adanya subyek yang saling terbelah dan terbagi ke dalam hierarki. Bagi Rancière, polis adalah selubung ketidakadilan dalam arena ekonomi. Pada awalnya memang

²Davis. Oliver. *Jacques Rancière: Key Contemporary Thinkers*. UK: Polity Press, 2010. Hlm. 1.

³Ibid. Hlm. 2.

⁴May. Todd. *The Political Thought of Jacques Rancière: Creating Equality*. Edinburgh University Press Ltd; Edinburgh, 2008. Hlm. 45.

relasi ekonomi lah yang dianggap membutuhkan politik, dimana manusia satu dieksploitasi oleh manusia yang lainnya.

Politik dipahami kontras dengan polis, yaitu merupakan lawan dari polis. Politik adalah segala aktivitas yang memutuskan keterkaitan dengan polis dengan menemukan subyek yang baru. Dengan pandangan-pandangan itu maka esensi dari politik sendiri adalah upaya untuk menginterupsi atau mematahkan distribusi sensibilitas dengan menyodorkan atau mengukuhkan kehadiran mereka yang tersingkirkan keluar dari sistem. Rancière membahasakan mereka yang tersingkirkan dengan sebutan '*Le Part Sans – Part*' (bagian yang tak memiliki bagian). Politik berupaya untuk menemukan cara agar mereka yang masuk ke dalam 'bagian yang tak memiliki bagian' ini dapat kembali hadir untuk merebut posisi serta perannya masing – masing di dalam sistem. Kehadirannya ini untuk mencapai serta mempertahankan kesetaraan. Kesetaraan bukanlah sebuah tujuan, melainkan merupakan sebuah kondisi yang harus dipertahankan dan diperjuangkan pencapaiannya di dalam masyarakat pluralis demokrasi. Kesetaraan bersifat universal atas usahanya merangkul 'bagian yang tak memiliki bagian' dalam ketegangan antara polis dengan politik, karena bahwasanya setiap subyek itu setara di dalam masyarakat karena memiliki kemampuan intelegensi yang sama dengan modal dapat berpikir dan berbahasa.

Berdasarkan pemikiran Rancière di atas, dapat dipahami bahwa perhatian utamanya bukanlah pada formulasi kesepakatan atau penjaminan tatanan, namun lebih pada penemuan kebaruan melalui modus-modus 'tak resmi' yang mendorong ketidaksetujuan dan pencapaian perubahan. Demokrasi hanya jalan sebagai demokrasi apabila menyertakan seluruh masyarakat secara utuh, termasuk mereka yang dengan sengaja disingkirkan sebelumnya agar dapat kembali hadir merebut posisi serta perannya sebagai warga setara dalam sistem demokrasi. Perhatian Rancière juga tertuju pada tindakan politik untuk memperjuangkan kesetaraan. Kesetaraan menurutnya dibagi menjadi dua yaitu, kesetaraan aktif (*active equality*) dan kesetaraan pasif (*passive equality*). Kesetaraan tidak dapat dipahami secara pasif, melainkan kesetaraan sebagai tindakan untuk menerobos hierarki sensibilitas. Rancière beranggapan bahwa setiap subyek dapat berpikir dan berbahasa karena pikiran mampu melelehkan segala regulasi dan menantang

segala bentuk klasifikasi sosial. Bagi Rancière, yang paling terpenting adalah adanya sebuah kondisi yang dinamakan ‘setara’ di dalam masyarakat. Bukan bentuk kesetaraannya, tetapi lebih pada tindakan subyek ‘bagian yang tak memiliki bagian’ untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan berpikir serta berbahasa mereka guna mematahkan rezim partisi sosial yang diakibatkan oleh polis. Bagi Rancière, kemunculan mereka – bagian yang tak memiliki bagian – yang tersingkirkan inilah yang terpenting, agar mereka dapat merebut kembali peran serta posisinya sebagai subyek politik guna mencapai kesetaraan dan mempertahankannya. Kesetaraan juga berarti menyediakan tempat bagi setiap ideologi tanpa adanya penyingkiran atau penyalahan sepihak yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisannya, skripsi ini akan terbagi dalam empat bab, dan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang dibuat oleh penulis ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, *thesis statement* dari skripsi ini, tujuan daripada penulisan skripsi ini, metode penulisan yang dipilih, kerangka teori Jacques Rancière yang penulis gunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan tema kesetaraan masyarakat pluralis demokrasi, dan yang terakhir pada bab ini yaitu sistematika penulisan yang akan memaparkan isi daripada skripsi ini.

Bab 2 : Masyarakat Pluralis dan Demokrasi

Bab ini berisi penjelasan tentang paham pluralisme, masyarakat pluralis, lalu tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang banyak dipilih oleh negara-negara pada masa masyarakat moderen saat ini.

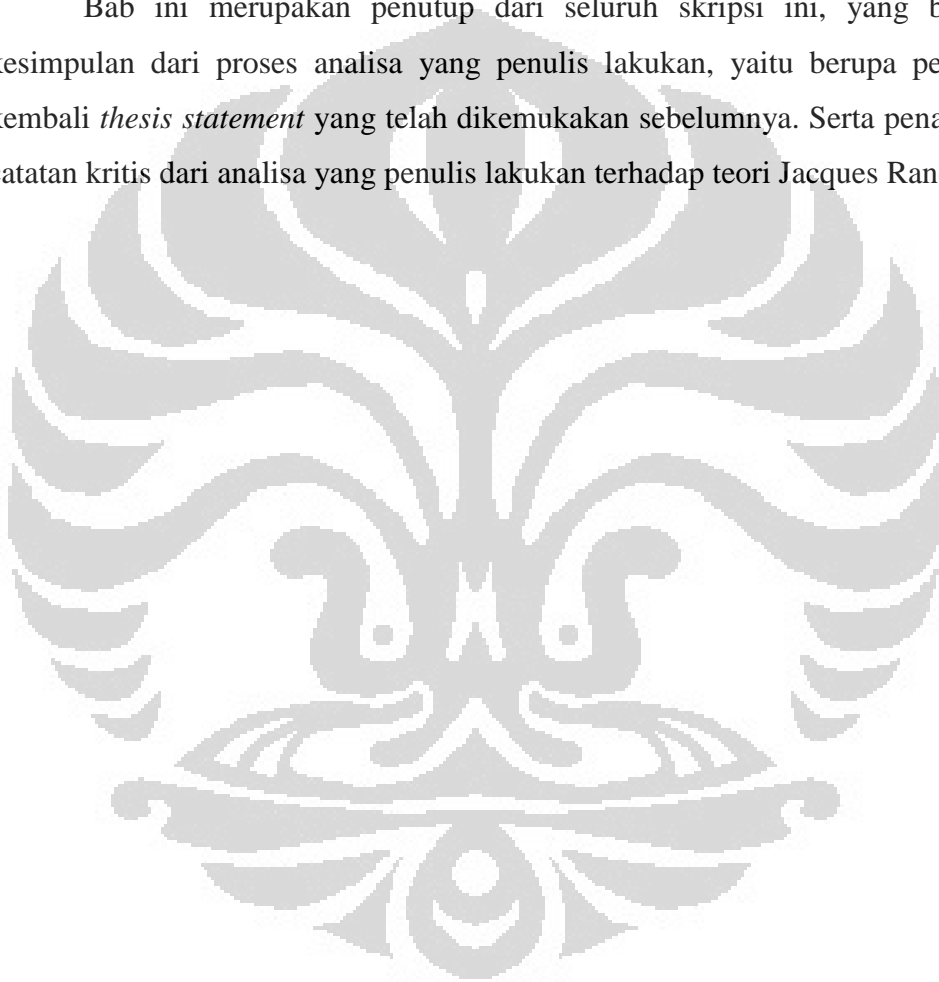
Bab 3 : Konsep Kesetaraan Jacques Rancière

Berisi penjelasan tentang latar belakang Jacques Rancière, akar pemikirannya, konsep kesetaraan dan ketidaksetaraannya, terutama dalam hal apa

saja yang menjadi pendasarannya pada tema kesetaraan. Penjelasan mengenai konsep polis dan politiknya, serta memberikan jalan keluar pada permasalahan ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat pluralis yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Solusi yang ditawarkan adalah melalui politik demokrasi disensus guna melakukan demokratisasi melalui deklasifikasi.

Bab 4 : Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup dari seluruh skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dari proses analisa yang penulis lakukan, yaitu berupa penegasan kembali *thesis statement* yang telah dikemukakan sebelumnya. Serta penambahan catatan kritis dari analisa yang penulis lakukan terhadap teori Jacques Rancière.



BAB II

MASYARAKAT PLURALIS DAN DEMOKRASI

Manusia pada dasarnya tidak sama dengan manusia lainnya. Kemiripan identitas yang melekat pada diri setiap manusia nyatanya tetap tidak menjadikannya sama dengan yang lainnya. Sifat manusia yang senantiasa selalu berusaha untuk menciptakan kebaruan dalam kehidupannya, yang mana hal tersebut merupakan sifat asalnya, membuat manusia tidak pernah puas dan selalu ingin mengembangkan dirinya. Identitas manusia pun menjadi bersifat tidak statis, melainkan terus bergerak dinamis sesuai dengan caranya dalam mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya. Keadaan yang terus bergerak dinamis inilah lalu memunculkan sebuah keadaan masyarakat yang plural, yaitu keadaan masyarakat yang di dalamnya memiliki beragam perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Keragaman perbedaan menjadi ciri utama masyarakat majemuk, yang mana telah menjadikan keadaan masyarakat saat ini dilukiskan dengan tatanan sistematis yang terklasifikasi dengan *label* dan *levelling*.

2.1 Pluralisme

Pluralisme dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman. Dalam politik demokrasi, pluralisme merupakan prinsip yang memungkinkan koeksistensi damai kehidupan yang berbeda, keyakinan, serta gaya hidup. Mengutip dalam *Cambridge Dictionary of Philosophy*, “*Pluralism, a philosophical perspective on the world that emphasizes diversity rather than homogeneity, multiplicity rather than unity, difference rather than sameness*” (Pluralisme, sebuah perspektif filosofis akan dunia yang lebih menekankan keanekaragaman daripada homogenitas, keragaman daripada kesatuan, perbedaan daripada kesamaan).⁵ Dalam masyarakat plural, keanekaragaman perbedaan yang mendasar antar subyek memunculkan kepentingan subyek yang berbeda-beda antara yang satu

⁵Robert, Audi., ed. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. New York: Cambridge University Press, 1999. Hlm. 714.

dengan yang lainnya. Pluralisme memungkinkan semua kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas untuk mempengaruhi proses politik sehingga dapat mencegah terjadinya suatu kelompok mendominasi kelompok lain. Sistem ini beranggapan keputusan politik yang penting lebih dapat dipengaruhi secara efektif melalui kelompok yang terorganisasi dengan baik. Pluralisme dalam ilmu sosial, adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan adanya rasa saling menghormati dan saling toleransi satu sama lain. Pluralisme adalah pemahaman akan persatuan dan perbedaan. Hal ini berarti kesadaran akan suatu ikatan, dalam arti tertentu bersama-sama dengan kesadaran akan keterpisahan dan perpecahan kategoris. Mengambil contoh pemikiran Isaiah Berlin yang tertuang dalam buku *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas*, di dalam buku ini tertulis bahwa Berlin memandang bahwa pluralisme tidak dapat berdiri sendiri, ia telah dimodifikasi dan dipandu oleh pandangan dan komitmen yang lain.⁶ Dapat dipahami bahwa pluralisme tidak dapat dipisahkan dari kemajemukan. Pluralisme saat ini menjadi pengemudi utama yang memajukan bidang ilmu pengetahuan, masyarakat, dan juga perkembangan ekonomi, yang didasari pada sifat subyek yang ingin selalu mengembangkan potensi yang dimilikinya dan kekuasaan serta penentuan keputusan pun menjadi lebih tersebar.

Penentuan keputusan yang tersebar menjadikan konflik dalam pluralisme akan tetap selalu ada. Pluralisme yang tanpa konflik berarti bukanlah pluralisme, namun hanyalah suatu lingkungan yang homogenitas. Mencegah konflik pluralisme berarti menuntut sikap toleransi antar setiap manusia untuk menghargai perbedaan dan merayakannya, maksudnya bahwa dengan menghargai perbedaan berarti subyek mengakui perbedaan memang ada dan merayakannya berarti ia menerima perbedaannya bukan sebagai bentuk intervensi terhadap eksistensi subyek lain. Sikap toleransi ini berarti setiap manusia mengakui dan menghargai perbedaan yang tidak akan pernah terjembatani walaupun sama-sama berada dalam sebuah 'kotak' klasifikasi yang dibuat oleh sistem politik. Pluralisme mengajarkan subyek untuk menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa

⁶Henry, Hardy., ed. *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas*. London: Knopf, 1990. Hlm. 17.

serta mewujudkannya sebagai keniscayaan. Karena perbedaan dan keragaman merupakan hal yang nyata, maka yang diperlukan adalah pemahaman yang baik dan lengkap tentang yang lain, serta mengkaji pluralisme tidak dapat dilepaskan dari permasalahan-permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik, demokrasi, ketidaksetaraan, kesetaraan, dan lain-lain. Jadi, pluralisme seharusnya tidak menetapkan batas bagi ideologinya sendiri, ia akan selalu terbuka, luwes, dan mampu mengakomodasi setiap perbedaan dalam masyarakat majemuk. Komponen-komponen yang membentuk kemajemukan tersebut seharusnya tidak dipahami sebagai esensi yang statis, melainkan sebagai rangkaian proses yang dinamis, karena pluralisme menghasilkan beragam pandangan yang tentunya akan memperkaya ideologi sebuah negara.

Inti dari penjelasan di atas yang dapat ditarik menjadi kesimpulan dalam sub-bab ini, bahwa pluralisme menuntut kesiapan setiap individu dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Mengatasi konflik, baik dalam hubungan sosial, ras, etnis, suku, maupun agama, berarti menuntut subyek untuk dapat saling bersikap toleran dalam masyarakat sehingga subyek mengakui perbedaan memang ada dan merayakannya. Pluralisme juga berarti menerima perbedaan bukan sebagai bentuk intervensi terhadap eksistensi subyek lain, hal ini akan lebih jauh dibahas oleh penulis pada bab berikutnya.

2.1.2. Masyarakat Pluralis

Pada hakekatnya, manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup seorang diri saja. Manusia memerlukan manusia lainnya di berbagai tingkat kelembagaan hidupnya, baik dalam suatu komunitas terkecil, seperti keluarga, maupun dalam komunitas yang lebih besar lagi. Negara menjadi 'komunitas' paling luas yang berisi banyak subyek manusia yang saling berinteraksi dengan pandangan-pandangan yang berbeda dalam melihat suatu hal. Tidak ada masyarakat yang tanpa kemajemukan. Manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan dari keragaman dan kemajemukan yang timbul sebagai akibat dari proses interaksinya dengan orang lain. Kemajemukan juga tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena seolah-olah keduanya adalah satu kesatuan yang saling mengisi

satu sama lain. Suatu wilayah yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama atau kepercayaan yang dianut, latar belakang pendidikan, umur, serta mata pencaharian, dan lain-lain ini dapat menjadi beberapa faktor keanekaragaman atau kemajemukan di dalam wilayah tersebut. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pemikiran setiap individu dan pemahamannya dalam memaknai berbagai situasi serta kondisi yang terjadi, baik dalam kehidupannya sendiri maupun yang terjadi di lingkungannya. Contoh misalnya pada kasus buruh pekerja dan pegawai perusahaan tentu memiliki pendapat yang berbeda setelah menghadiri pentas teater di Gedung Kesenian Jakarta.

Kemajemukan yang ada dalam masyarakat erat kaitannya dengan pluralisme, karena pluralisme menuntut toleransi antar umat manusia. Masyarakat pluralis adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai unsur dengan sub-kulturnya masing-masing, yang lalu menjalin kesepakatan menampilkan diri sebagai suatu komunitas yang utuh. Berbeda dengan masyarakat heterogen yang unsur-unsurnya tidak memiliki komitmen ideologis yang kuat. Masyarakat pluralis tidak hanya sebatas mengakui dan menerima kenyataan kemajemukan masyarakat, tetapi harus dipahami sebagai suatu ikatan dan pertalian sejati. Masyarakat pluralis juga memandang eksistensi dari diri manusia lainnya, dengan perbedaan antara dirinya dengan yang lain, merupakan hal yang baik di dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat pluralis adalah masyarakat majemuk yang memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Perbedaan ini lah yang seringkali menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Masyarakat pluralis harus memiliki cara bagaimana dapat mengakomodir perbedaan tersebut. Karena perbedaan-perbedaan tersebut sangat rentan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik ini terjadi karena adanya tindakan atau perlakuan antara 'yang mendominasi' dengan 'yang didominasi'. Gamblangnya dapat dikatakan konflik antar kelompok mayoritas dan kelompok minoritas.

Adanya pengklasifikasian dalam masyarakat memunculkan dua kelompok, yaitu kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas adalah kelompok yang memegang peranan lebih besar dalam sistem. Kelompok ini memiliki identitas-identitas yang serupa dengan banyak individu dalam sistem, sebagai contoh misalnya masyarakat kulit putih di Amerika Serikat atau

masyarakat yang berasal dari pulau jawa di jakarta. Sedangkan kelompok minoritas adalah kelompok yang termarginalkan dari sistem, yang mana dapat dikatakan bahwa kelompok ini tidak memiliki kapabilitas yang sama dengan kelompok yang lain (mayoritas). Contohnya, masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat atau kaum perempuan di DPR. Dua kelompok ini memiliki hubungan ‘yang mendominasi’ dan ‘yang didominasi’. Kelompok mayoritas sebagai pihak yang mendominasi dan kelompok minoritas sebagai pihak yang didominasi. Untuk mengatasi konflik yang selalu ada tersebut, maka dipilihlah sistem demokrasi yang dianggap sebagai sistem politik yang paling cocok dalam menangani masyarakat pluralis. Sistem demokrasi membuka serta menyediakan ruang untuk berkonflik sekaligus juga dapat menerima perbedaan.

2.2. Demokrasi

Demokrasi erat kaitannya dengan masyarakat majemuk karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianggap sangat cocok untuk masyarakat pluralis. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang setara di dalam masyarakat. Setara yang diharapkan tidak hanya sekedar setara, namun juga sekaligus dapat merayakan perbedaan. Saat ini, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang paling populer dan didambakan oleh para rakyat maupun segenap insan politik dalam kehidupan politik. Demokrasi memungkinkan adanya perbedaan pendapat untuk dapat dijabatani melalui praktik-praktik dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara etimologi, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (*dēmokratía*) yang berarti ‘kekuasaan rakyat’. Dibentuk dari kata δῆμος (*dêmos*) yang artinya ‘rakyat’, dan κράτος (*Kratos*) yang artinya ‘kekuasaan’. Istilah demokrasi bagi Aristoteles adalah sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi dalam pidato Gettysburgnya.⁷ “... and that government of the people, by the people, for the people (pemerintahan oleh rakyat, dari

⁷Pidato Gettysburg adalah pidato yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, diberikan di *Soldiers' National Cemetery*, Gettysburg, Pennsylvania, pada Kamis siang tanggal 19 November 1863.

rakyat, untuk rakyat)”. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan serta suara yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan.

Demokrasi secara umum merujuk pada corak kekuasaan atau pemerintahan yang kedaulatan kekuasaannya berada di tangan rakyat. Pada perkembangannya saat ini, telah terjadi pengayaan makna istilah ‘rakyat’ sebagai ‘orang banyak’ dalam wacana demokrasi. Pengayaan makna ini akibat dari kontingensi dengan wacana liberal yang dalam hal ini menjadi ‘kumpulan individu-individu’. Masing-masing perseorangannya tidak hanya berdaulat secara legal politik di suatu wilayah kedaulatan tertentu, namun juga memiliki hak-hak individual yang harus dijamin oleh pemerintah.

Demokrasi dipahami sebagai tata-kelola pemerintahan dan sistem politik, yang di dalamnya ‘kekuasaan dikelola oleh sebuah mayoritas (secara senantiasa temporer) sejalan dengan prosedur tertentu’ dan pemangku kuasa politik tersebut harus sedapat mungkin menghargai kebebasan dan penentuan diri sendiri daripada warga.⁸ Secara harfiah, istilah demokrasi merujuk pada seorak kekuasaan atau pemerintahan yang daulat kuasanya berada pada tangan ‘yang banyak’, pada orang banyak, pada mayoritas, pada *pleithos* (massa), atau gamblangnya pada rakyat.⁹ Hal ini berarti, demokrasi dipandang sebagai sebuah pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan ‘orang banyak’, berada di tangan mayoritas, atau dengan gamblang dapat dikatakan berada di tangan rakyat. Inilah pengertian demokrasi yang banyak dipahami oleh masyarakat pada saat ini.

2.2.1. Demokrasi Saat Ini

Demokrasi mungkin menjadi sebuah kata yang sepertinya sangat diketahui dan dipahami oleh banyak orang, namun masih sedikit sekali mereka yang benar-benar mengerti dan paham akan arti dari demokrasi itu sendiri. Pertama kali timbul istilah Demokrasi yang memunculkan rakyat sebagai penguasa negara ialah pada zaman Yunani kuno. Demokrasi pada awalnya mengacu pada konstitusi (sistem pemerintahan) tempat rakyat miskin lebih bisa menggunakan

⁸Danujaya, Budiarto. *Demokrasi Disensus; Politik dalam Paradoks*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012. Hlm. xv.

⁹Bobbio, Norberto. *Liberalism and Democracy*. London: Verso, 1990. Hlm. 25.

kekuasaan untuk membela kepentingan mereka yang acap kali tersingkirkan oleh kepentingan kaum kaya. Masyarakat pada saat itu berhak untuk turut ambil bagian dalam pemerintahan walaupun tidak seluruh masyarakat dapat ikut ambil bagian, karena hanya yang merupakan masyarakat resmi yang dapat ikut serta dalam sistem pemerintahan, yaitu para kaum bangawan dan laki-laki dewasa saja. Demokrasi pada awalnya merupakan kekuasaan negara yang murni berada di tangan rakyat. Dan dalam implemenasinya di Yunani, demokrasi merupakan sistem pengambilan suara yang dilakukan secara langsung. Konsep demokrasi yang berkembang dalam alam pemikiran Yunani itu kemudian banyak berpengaruh terhadap sistem pemerintahan di Eropa, Amerika, Afrika, dan termasuk juga Indonesia.

Demokrasi pada saat ini telah dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang paling baik bila dibandingkan dengan sistem pemerintahan lain, walaupun dalam pelaksanaannya saat ini seringkali tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan. Demokrasi yang erat kaitannya dengan kebebasan ini, karena di dalam demokrasi setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing, nyatanya masih saja ada pembatasan kebebasan di dalamnya. Hal ini berarti, demokrasi yang berlangsung saat ini merupakan demokrasi yang konsensus. Orientasi metodis dari praksis demokrasi konsensus pada dasarnya lebih bertumpu pada pengupayaan bersusah-payah berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan aktual dengan cara memaksimalkan jumlah individu yang menyetujui tindakan atau kebijakan yang akan ditempuh.¹⁰ Demokrasi sebagai politik konsensus dipahami sebagai kesepakatan Penjaminan hak asasi setiap individu, termasuk mereka yang terpinggirkan, yang namun pada akhirnya menciptakan kondisi ketidaksetaraan karena peminggiran-peminggiran kepentingan kelompok minoritas demi keputusan mayoritas. Budiarto Danujaya dalam bukunya *Demokrasi Disensus; Politik dalam paradoks* menulis, “Sebaliknya, demokrasi sebagai politik disensus tidak mempercayai kesanggupan politik apapun, bahkan mekanisme rekonstruktif apapun yang menggalang

¹⁰Rescher, Nicholas. *Pluralism: Against the Demand for Consensus*. Oxford: Oxford University Press, 1995. Hlm. 188-189.

konsensus.”¹¹ Demokrasi sebagai politik disensus inilah yang diharapkan dapat menciptakan kondisi kesetaraan dalam masyarakat. Mereka meyakini bahwa demokrasi akan melindungi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Demokrasi memang merupakan sistem pemerintahan yang pengambilan keputusannya didasarkan pada kelompok mayoritas. Namun demokrasi juga seharusnya melindungi hak dan kepentingan kelompok minoritas. Hal tersebut yang seringkali masih tidak terjadi, bahwa demokrasi tidak melindungi hak dan kepentingan kelompok minoritas.

Ada dua landasan pokok yang menjadi dasar daripada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya. Dan yang kedua, siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah ia selaku ‘pengurus’ rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku ‘pelayan’ rakyat, yaitu tidak boleh bertindak zalim terhadap ‘tuannya’, yakni rakyat. Demokrasi yang banyak dipahami oleh masyarakat pada saat ini adalah perpaduan antara ‘gagasan mengenai kuasa dari rakyat dan gagasan mengenai hak-hak individual yang dijamin secara hukum’.¹² Demokrasi sesungguhnya secara konseptual lebih ditekankan pada sumber kekuasaan dibandingkan dengan cara memerintah. Di dalam demokrasi sendiri seharusnya suara rakyat dianggap lebih penting, karena suara rakyat mewakili kelompok lemah yang dengan sengaja dibungkam oleh kelompok-kelompok yang memiliki kuasa lebih besar. Demokrasi tidak hanya rumit, namun juga memiliki berbagai pandangan dalam mengartikannya. Demokrasi pada hakekatnya seharusnya merupakan cara yang canggih untuk mengelola konflik yang ada dalam masyarakat majemuk, namun kepentingan para subyek juga seringkali memunculkan konflik-konflik dalam demokrasi sehingga menjadi kondisi perebutan kekuasaan.

Menurut Jane Addams,

“... For Addams, democracy represented both of mode of living and social morality. She viewed democracy as an acknowledgement that the lives of

¹¹Danujaya. op. cit. Hlm. xix.

¹²Danujaya. op. cit. Hlm. xv.

citizens are bound up with one another and this relationship creates a duty to understand the struggles and circumstances of fellow citizens”

Demokrasi diwakili kedua bentuk kehidupan dan moralitas sosial. Ia memandang demokrasi sebagai pengakuan bahwa kehidupan warga negara terikat dengan satu sama lain dan hubungan ini menciptakan tugas untuk memahami perjuangan dan keadaan sesama warga.¹³

Bagi Rancière , *“Democracy is the community of sharing, in both of senses of the term: membership in a single word which can only be expressed in adversarial terms, and a coming together which can only occur in conflict”* (Demokrasi merupakan komunitas untuk berbagi, dalam kedua penggunaan dari pengertian: pengertian keanggotaan dalam kata tunggal hanya dapat diungkapkan dengan istilah permusuhan, dan jika dilihat secara bersamaan dimana hanya dapat terjadi dalam konflik).¹⁴ Istilah demokrasi sudah diterapkan pada lapangan dan lembaga-lembaga yang jauh dari politik. Ia juga diartikan sebagai suatu cita-cita yang tidak mungkin dicapai manusia. Tujuan tertinggi sebuah sistem pemerintah demokratis adalah memaksimalkan perkembangan diri setiap individu guna menciptakan kondisi yang setara di dalam masyarakat. Dan sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang benar-benar atau hampir mutlak bertanggung-jawab kepada semua warga negaranya. Definisi seperti itu dapat relevan terhadap teori politik normatif, namun tidak banyak gunanya untuk analisis empiris komparatif.

Pada masa masyarakat modern saat ini, secara umum terdapat dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapatnya secara langsung dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

“Sebuah penataan sosial dipandang absah (layak) sejauh para anggota masyarakat akan – apabila sungguh-sungguh nalar – memilihnya salam keadaan-keadaan ideal (para warga berada dalam daulat setara, tak berada di bawah tekanan atau paksaan, diperlengkapi semua informasi yang relevan, dst”¹⁵

¹³<http://www.iep.utm.edu/addamsj/#SH2c> diunduh pada tanggal 6 Juni 2012, pukul 12.26 WIB

¹⁴Rancière, Jacques. *On The Shore of Politics*. London: Verso, 1992. Hlm. 49.

¹⁵Danujaya. op. cit. Hlm. xvii.

Sedangkan demokrasi perwakilan berarti seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Bila demokrasi diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat, maka sudah pasti rakyat lah yang menentukan nasibnya sendiri. Namun masyarakat modern saat ini, khususnya bagi negara-negara yang memiliki banyak wilayah kepulauan yang tersebar, tentu akan sangat sulit mengumpulkan seluruh warga untuk berunding menentukan nasib mereka. Maka dibentuklah sebuah ‘perwakilan’ (negara) serta memilih pemimpin Negara yang dipercaya dapat mewakili aspirasi mereka, inilah yang disebut sebagai sistem pemerintahan demokrasi perwakilan.

“Sebuah penataan sosial dipandang absah (layak) sejauh ia dicapai oleh para anggota sebuah masyarakat lewat proses-proses dan prosedur-prosedur yang mengatur sebuah diskusi yang ideal – yakni sebuah pencarian konsensus di antara para agen yang sungguh-sungguh rasional yang bertindak dalam keadaan-keadaan yang ideal (semua berdaulat setara, tak bertindak di bawah tekanan, diperlengkapi dengan informasi yang relevan, dst.”¹⁶

Demokrasi perwakilan menjalankan pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat sendiri, melalui pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu. Wujud ‘kekuasaan rakyat’ tidak hanya terlihat dari pemilihan umum saja, namun rakyat juga turut berpartisipasi dalam penentuan keputusan-keputusan politik yang lain, seperti membentuk LSM, melakukan protes rakyat, dan demonstrasi. Wujud di atas merupakan bentuk dari ekspresi kebebasan berpendapat mereka. Di dalam sistem pemerintahan demokrasi, Negara harus dapat menjamin kebebasan berpendapat setiap warganya. Kebebasan berpendapat memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kehendak dan opini publik, dan dengan demikian dapat ‘berdiskusi’ dengan politisi. Sehingga menunjukkan bahwa ada komunikasi antara politisi dan warga, inilah yang disebut ‘demokrasi komunikatif.’ Dalam sistem demokrasi ini, sekumpulan manusia dipilih untuk kemudian ditempatkan pada posisi yang sedemikian istimewanya, yang mendapat tugas mewakili rakyat, sehingga mereka diperlakukan sebagai pihak ‘yang dicintai, dipatuhi, serta ditakuti.’ Semua ciri

¹⁶Danujaya. op. cit. Hlm. xviii.

tersebut telah dibangun sejak mereka masih berkampanye menawarkan janji-janji manis yang akan menarik simpati masyarakat agar memilih mereka dalam pemilu. Karena inilah banyak orang terbius oleh demokrasi. Mereka terlena oleh janji-janji muluk yang digembar-gemborkan oleh para pengusung demokrasi. Mereka mengira, sistem demokrasi akan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih modern, padahal pada kenyataannya saat ini belum ada pembuktian dari janji-janji yang ditawarkan sebelumnya.

Demokrasi sebagaimana yang kita kenal saat ini, secara mekanisme, sesungguhnya merupakan semacam penyederhanaan dari proses pengolahan berbagai kepentingan orang banyak yang dimasukkan ke dalam aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Hal ini berarti, demokrasi yang berlangsung saat ini merupakan demokrasi yang konsensus. Namun hal tersebut kerap sulit diterjemahkan secara tepat, yang dalam banyak hal kerap dijumpai, bahkan dalam praktek berdemokrasi, aksentuasi perjuangan elit politik lebih terfokus pada kepentingan partai (politik) ketimbang kepentingan orang banyak, yang dalam praktiknya lebih mengarah kepada *political society* daripada *civil Society*. Demokrasi, sebagai sebuah tata politik, mengandung sebuah tesis mengenai ‘homogenitas’. Maksudnya, demokrasi secara alamiah membentuk distingsi antara ‘kami’, sebagai orang-orang yang diikat dalam suatu identitas yang sama (*demos*), dan ‘mereka’, yakni orang-orang yang berada di seberang sana. Dengan kata lain demokrasi selalu bersifat politikal.¹⁷ Politik merupakan seni kemungkinan, terutama berkaitan dengan hal ihwal menyangkut kekuasaan, bagaimana ia direbut, dipertahankan dan disebar. Dan resikonya memang akan ada banyak hal yang menjadi tidak tersentuh, bahkan terabaikan dan terkorbakan. Biasanya, idiom ‘kepentingan rakyat’ hanya pemanis bibir para elit politik yang ada, yang mana biasanya menjadi lahan eksploitasi empuk pada masa menjelang Pemilu.

Demokrasi juga tidak bisa dilepaskan dari kebebasan, karena kebebasan merupakan prasyarat agar rakyat tetap dapat melaksanakan kedudukannya sebagai sumber kedaulatan dan sumber kekuasaan di dalam negara.

“Some argue that the basic principles of democracy are founded in the idea that each individual has a right to liberty. Democracy, it is said,

¹⁷Schmitt, Carl. *The Concept of The Political*. Chicago: The University of Chicago Press, 1996. Hlm. 19.

extends the idea that each ought to be master of his or her life to the domain of collective decision making”

Beberapa berpendapat bahwa prinsip dasar demokrasi didirikan pada ide bahwa setiap individu memiliki hak kebebasan. Demokrasi, dikatakan, memperluas ide bahwa masing – masing individu seharusnya menjadi tuan atas hidupnya untuk wilayah membuat keputusan bersama.¹⁸

Demokrasi ditandai dengan kebebasan yang besar dalam segala hal, dimana seseorang dapat melakukan apa pun sesuai keinginan atau kehendaknya untuk melakukan. Kebebasan harus diwujudkan bagi setiap subyek agar mereka tetap dapat melaksanakan kedaulatannya dan menjalankannya sendiri, serta menerima haknya dengan tanpa ada tekanan atau paksaan. Maka dari itu, mematangkan demokrasi sama artinya dengan mematangkan sistem berpikir. Sebab kericuhan yang terjadi dalam demokrasi selama ini jelas ada hubungannya dengan sistem berpikir sekelompok orang-orang yang ingin memutlakkan kekuasaan. Bila prosesnya dilihat sebagai substansi demokrasi, tentu tidak ada masalah serius. Prosesnya selalu harus dijaga agar bersih, karena dalam proses itulah ‘jiwa demokrasi’ ada dan hidup. Kalau prosesnya kotor, maka jiwanya pun hitam.

Tatanan masyarakat yang demokratis, idealnya terjadi komunikasi antara masyarakat dan politisi yang berlangsung secara terus menerus. Kenyataannya, dialog antara kedua belah pihak ini seringkali tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan konflik. Banyak warga masyarakat yang merasa tidak punya waktu untuk mengurus masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sementara yang lainnya tidak berminat, dan sisanya memilih diam karena putus asa suara mereka tidak didengar dalam urusan partai politik. Keraguan-keraguan tersebut menjadi tantangan dalam demokrasi. Namun banyak juga dari masyarakat yang masih tetap optimis menginginkan adanya perubahan dengan terus melakukan dialog dengan para wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan, walaupun pada akhirnya tidak jarang para wakil rakyat dengan sengaja tidak mendengar pendapat mereka. Atau bahkan mereka belum melakukan tindakan politik apapun untuk memperjuangkan kesetaraan karena tidak adanya akses bagi perubahan. Hal tersebut membuat makna demokrasi kian meluntur akibat

¹⁸ <http://plato.stanford.edu/entries/democracy/> diunduh pada tanggal 25 Juni 2012 pukul 22.45 WIB.

masyarakat seperti kehilangan kepercayaan terhadap para pejabat pemerintahan. Banyak warga yang mulai mempertanyakan apakah demokrasi mampu menyelesaikan permasalahan yang ada seperti pengangguran massal, kejahatan yang terorganisasi, terorisme, serta apakah ia mampu menghadapi bahaya yang misalnya akan timbul akibat globalisasi dari perusahaan-perusahaan dunia. Fenomena inilah yang disebut dengan 'krisis demokrasi'. Karena di dalam sistem demokrasi, fokus yang utama adalah rakyat, sebagaimana sesuai dengan pengertian demokrasi secara harfiah, dan negara hanyalah sebagai alat bagi rakyat untuk dapat mencapai tujuannya.

Demokrasi saat ini, secara mekanisme, sesungguhnya merupakan semacam penyederhanaan dari proses pengolahan berbagai kepentingan orang banyak yang dimasukkan ke dalam aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Hal ini berarti, demokrasi yang berlangsung saat ini merupakan demokrasi yang konsensus. Orientasi metodis dari praksis demokrasi konsensus pada dasarnya lebih bertumpu pada pengupayaan bersusah-payah berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan aktual dengan cara memaksimalkan jumlah individu yang menyetujui tindakan atau kebijakan yang akan ditempuh.¹⁹ Demokrasi sebagai politik konsensus dipahami sebagai kesepakatan Penjaminan hak asasi setiap individu, termasuk mereka yang terpinggirkan, yang namun pada akhirnya menciptakan kondisi ketidaksetaraan karena peminggiran-peminggiran kepentingan kelompok minoritas demi keputusan mayoritas. Budiarto Danujaya dalam bukunya *Demokrasi Disensus; Politik dalam paradoks* menulis, "Sebaliknya, demokrasi sebagai politik disensus tidak mempercayai kesanggupan politik apapun, bahkan mekanisme rekonstruktif apapun yang menggalang konsensus."²⁰ Demokrasi sebagai politik disensus inilah yang diharapkan dapat menciptakan kondisi kesetaraan dalam masyarakat.

¹⁹ Rescher, Nicholas. *Pluralism: Against the Demand for Consensus*. Oxford: Oxford University Press, 1995. Hlm 188-189.

²⁰Danujaya. op. cit. Hlm xix.

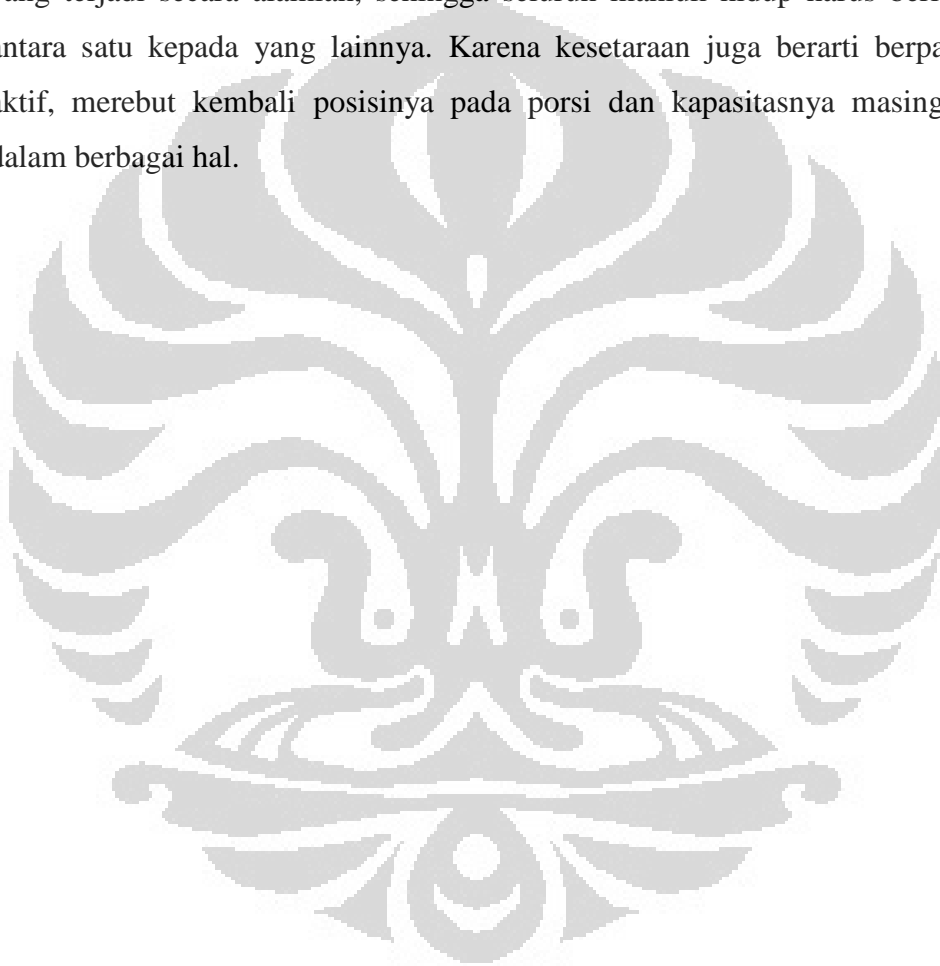
2.2.2. Ketidaksetaraan dan Kesetaraan dalam Masyarakat Pluralis

Pada kenyataannya saat ini, demokrasi adalah sistem di mana seringkali keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan dari kelompok mayoritas atau kelompok masyarakat yang telah mengalami 'sterilisasi'. Namun dalam masyarakat demokratis, kekuasaan mayoritas juga harus dibarengi dengan jaminan hak asasi individu yang juga melindungi hak-hak kelompok minoritas. Misalnya dalam bidang etnis, agama, atau politik, atau hanya yang kalah dalam perdebatan pada sehelai kontroversial undang-undang. Hak-hak kelompok minoritas tidak bergantung pada niat baik dari kelompok mayoritas, hak-hak tersebut tidak dapat dihilangkan dengan suara terbanyak, melainkan dilindungi karena undang-undang dan institusi demokratis melindungi hak semua warga negara.

Sistem demokrasi saat ini seringkali menjadi sistem pemerintahan oleh kelompok mayoritas. Hal inilah yang memunculkan adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ketidaksetaraan adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang diisi oleh kumpulan subyek atau kelompok yang menunjukkan adanya perlakuan tidak adil yang didapat oleh setiap subyek atau kelompok di dalam partisipasinya sebagai warga negara. Ketidaksetaraan tidak muncul begitu saja secara alamiah, namun muncul akibat adanya subyek atau kelompok yang merasa mendapat perlakuan diskriminasi dari subyek atau kelompok lainnya, yang mana mereka tidak menerima hak-hak mereka sebagai warga negara sesuai dengan yang telah tercantum dalam UUD 1945 akibat kesengajaan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan. Ketidaksetaraan dapat berupa apa saja, ia tidak terbatas hanya pada hal-hal yang material. Ketika subyek atau kelompok berpikir bahwa telah terjadi ketidaksetaraan, maka disitulah muncul ketidaksetaraan.

Adanya ketidaksetaraan di dalam masyarakat, yang mana karena keadaan dan kondisi inilah yang memicu keinginan setiap individu untuk mencapai kesetaraan. Secara umum, kesetaraan dipahami sebagai tata politik sosial dimana setiap subyek atau kelompok dalam suatu wilayah (negara) memiliki status yang sama sebagai warga masyarakat. Kesetaraan dapat berupa kesamaan di dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, kesetaraan juga

merupakan kondisi ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupun individu. Jadi, kesetaraan adalah suatu kondisi yang dituntut sebagai akibat dari adanya ketidaksetaraan yang dirasakan oleh subyek-subyek atau kelompok yang terdiskriminasi oleh subyek atau kelompok lain, sehingga mereka menuntut adanya kesetaraan bagi semua pihak tanpa memandang status atau jabatannya. Kesetaraan berlaku bagi seluruh makhluk hidup dan juga bagi benda-benda yang ada di alam semesta. Hal ini dikarenakan adanya keterikatan yang terjadi secara alamiah, sehingga seluruh makhluk hidup harus berlaku adil antara satu kepada yang lainnya. Karena kesetaraan juga berarti berpartisipasi aktif, merebut kembali posisinya pada porsi dan kapasitasnya masing-masing dalam berbagai hal.



BAB III

KONSEP KESETARAAN JACQUES RANCIÈRE

Individu di dalam demokrasi memiliki kebebasannya sebagai warga negara yang setara, karena demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling cocok diterapkan dalam sebuah bangsa yang memiliki keanekaragaman perbedaan di dalamnya. Adanya keanekaragaman di dalam masyarakat berarti juga akan memunculkan aspirasi serta kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Demokrasi sejatinya merupakan sistem pemerintahan yang dapat menampung seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang berarti seharusnya rakyat dapat merasakan hasil perjuangan politik demokrasi mereka, yaitu kesetaraan. Kenyataannya saat ini, skandal demokrasi memunculkan kondisi ketidaksetaraan yang terus berusaha untuk disembunyikan melalui ilusi kesetaraan dari rakyat yang telah disterilisasi. Kondisi dimana satu pihak terus berusaha terlihat lebih baik dengan terus menampakkan eksistensinya, namun sekaligus juga menyingkirkan pihak lainnya yang dianggap tidak memiliki kemampuan berpolitik yang sama. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimana mencapai kesetaraan yang seharusnya terjamin dalam demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan teori konsep kesetaraan dari Jacques Rancière .

3.1. Latar Belakang Jacques Rancière

Jacques Rancière , filsuf kelahiran Algeria pada tahun 1940. Ia dikenal sebagai murid Althusser, namun kemudian berpisah karena memiliki perbedaan pandangan. Rancière adalah seorang professor yang mengajar di *Universitas De Paris (St. Denise)*, ia menulis sebuah buku yang hingga kini sangat terkenal dan berpengaruh dalam pemikiran *Marxist Reading Capital (19652)* dan pada periode akhir 1970 hingga 1980-an ia menerbitkan karya-karya terkenalnya, seperti *The Night of Labor (1981)* dan *The Philosopher and His Poor (1983)*. Rancière

mengajar di *University of Paris VIII* dari tahun 1969 hingga tahun 2000, ia mengepalai *Chairs of Aesthetic and Politics* dari tahun 1990 hingga pensiun di *University of Paris VIII*. Jacques Rancière memulai filsafat politiknya dengan memberikan kritik atas filsafat yang dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, dan Karl Marx.

3.1.1. *Archipolitics, Metapolitics, Parapolitics*

Berbicara tentang pemikiran Rancière, tentu juga harus sedikit menyinggung pemikiran dari Plato, Aristoteles, dan Karl Marx yang merupakan akar dari pemikiran politik Rancière. Menurut Plato dalam filsafatnya bahwa masyarakat dibagi dalam kelas-kelas dengan tatanan fungsionalnya masing-masing. Pertama berisi para penguasa atau juga disebut sebagai pemegang peraturan rezim. Kedua, berisi para ksatria yang bertugas untuk menjadi pelindung. Ketiga berisi kaum pekerja. Setiap kelas-kelas ini diletakkan secara rigid tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan dan tidak diberikan celah sedikitpun bagi perubahan atau perpindahan kelas. Karena bagi Plato, keadilan adalah hierarki. Adil bagi Plato adalah bila tidak ada intervensi antar setiap kelas karena subyek telah diposisikan pada posisi dan perannya yang ajek.

Tidak jauh berbeda dengan pemikiran Plato, dalam pemikiran Aristoteles, penyingkiran kaum miskin dari politik melalui partisi dan hierarki sosial lebih terlihat jelas. Aristoteles membedakan dua kemampuan dalam diri manusia yaitu, *phone* dan *logos*. *Phone* adalah kemampuan untuk menyuarakan rasa sakit maupun rasa senang, sedangkan *logos* adalah kemampuan untuk berbahasa. Aristoteles juga membedakan dua forma kehidupan yaitu, *zoe* dan *bios*. *Zoe* adalah kemampuan kodrati, seperti kemampuan untuk makan, minum, beranak pinak, dan sebagainya. Sedangkan *bios* adalah forma kehidupan sebagai pemilik *logos* tersebut, yang mana dalam hal ini adalah subyek yang memiliki kemampuan berpikir dan berbahasa untuk berkomunikasi di dalam masyarakat. Menurut Rancière, Aristoteles telah melakukan penyingkiran terhadap kaum budak. Ia tidak memasukkan kaum budak ke dalam *demos* karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang sama.

Rancière mengkritik pemikiran dari Plato dan Aristoteles di dalam karyanya yang berjudul “*Dissensus*”. Menurut Rancière, di dalam pemikiran mereka, politik hanya berlaku terbatas bagi mereka yang memiliki kemampuan serta memiliki akses untuk mempraktikkannya. Dalam bahasa Yunani dinamakan *arkhe*²¹, yaitu prinsip yang mengidentifikasi yang memerintah dan yang diperintah. *Arkhe* adalah prinsip yang menetapkan siapa yang akan mengambil yang mana dari dua kategori di atas. Tidak berbeda dengan pemikiran Plato dan Aristoteles di atas, Rancière juga mengkritik pemikiran Karl Marx yang mengisolasi kelas proletariat (ideal) dari kelas pekerja actual. Mereka yang tidak memiliki kemampuan maka tidak memiliki kualifikasi untuk dihitung di dalam politik.

Dari pemikiran Plato, Aristoteles, dan Karl Marx, Rancière memberikan kritik atas ketiganya yang ia sebut dengan ‘*archipolitics*’, ‘*metapolitics*’ dan ‘*parapolitics*’. *Archipolitics* adalah model filsafat politik yang dimulai oleh Plato. Rancière menyebut *archipolitics* sebagai deskripsi atas pendekatan Plato tentang politik.

“Archipolitics, whose model is supplied by Plato, reveals in all its radicality the project of the community based on the complete realization of the arkhe of community, total awareness, replacing the democratic configuration of politics with nothing left over”

Archipolitics, adalah sebuah model yang diciptakan oleh Plato, mengungkapkan bahwa di dalam suatu proyek dari masyarakat beserta dengan radikalitas di dalamnya didasarkan pada pelaksanaan menyeluruh masyarakat *arkhe*, kesadaran total, menanggalkan susunan politik berdemokratis tanpa ada yang tersisa.²²

Di dalam *Archipolitics*, ‘yang politis’ hancur karena tidak ada kesetaraan di dalamnya. ‘Yang politis’ tidak muncul karena setiap manusia sudah diposisikan pada sebuah tempat dan posisi yang ‘diharapkan’ karena *archipolitics* menyusun dan menata setiap manusia dalam tembok yang rigid serta menolak kesamaan. Manusia di dalam konsep *archipolitics* tidak bergerak untuk mencapai kesetaraan karena *archipolitics* sendiri tidak menyediakan celah bagi kesetaraan. Rancière memperjelas tatanan Plato ini dengan mengemukakan,

²¹Bersifat sudah ada dari sananya (kodrat).

²²Rancière. 1999. op. cit. Hlm. 65.

“The equality of the law is first the equality of the mood... Archipolitics is the complete achievement of physis as nomos, community’s law complete and tangible coming into being. There can be no time out, no empty space in the fabric of the community”

Persamaan hukum adalah, pertama-tama, kesetaraan kehendak... Archipolitics adalah pencapaian sempurna akan *physis* sebagai *nomos*, hukum dari sebuah komunitas dan dapat dilihat secara kasat mata dan menjadi nyata. Tidak ada ruang waktu dan tempat kosong di dalam struktur masyarakat.²³

Bahwasanya, *archipolitics* adalah bentuk daripada polis. Subyek telah ditempatkan pada posisi serta perannya masing – masing. Jadi, tidak ada partisipasi aktif (tindakan politik) di dalam *archipolitics*, karena *archipolitics* telah mengklasifikasikan subyek dalam posisinya yang ajek.

Kedua, yaitu *parapolitics*. *Parapolitics* mendapatkan pendasarannya dari Aristoteles. Aristoteles berpendapat, *“It would be better if the most virtuous were to rule over the city and if they were to rule forever. But this natural of things is impossible wherever you have a city where ‘all are by nature equal.’”* (Alangkah lebih baiknya apabila yang paling baik yang memimpin sebuah kota dan apabila ia lah yang menjadi pemimpin untuk selamanya. Namun, secara alamiah hal ini adalah tidak mungkin apabila seseorang yang menguasai suatu kota dimana semua hal di dalamnya adalah sama).²⁴ *Parapolitics* juga menunjukkan ketidaksetaraan, karena hanya yang memiliki keutamaan lah yang dapat memimpin. Berarti ada pengorbanan – pengorbanan yang dilakukan terhadap kesetaraan²⁵. Di dalam *parapolitics*, *“Politics is a question of aesthetics, a matter of appearances. The good regime is one of that takes on the appearances of an oligarchy for the oligarchs and democracy for the demos”* (Politik adalah sebuah pertanyaan estetika dalam pencitraannya. Rezim yang baik adalah rezim yang berbentuk sebuah oligarki untuk para oligarki dan demokrasi untuk masyarakat).²⁶ Politik adalah percakapan, penampilan, atau pemunculannya dalam ruang publik. Di titik ini, *parapolitics* boleh dikatakan sebagai bentuk dari depolitisasi politik karena

²³Rancière. 1999. op. cit. Hlm. 68.

²⁴May. op. cit. Hlm. 44.

²⁵Adian, Donny Gahral. *Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkitan Liberalisme*. Penerbit Koekoesan: Depok, 2010. Hlm. 39.

²⁶Rancière. 1999. op. cit. Hlm. 74.

konflik dalam politik diterima tetapi untuk dengan segera direformulasikan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih lunak. Dalam kepolitikan kontemporer semua bentuk-bentuk kepolitikan yang berbasis pada pandangan kontrak dan deliberasi merupakan kelanjutan dari *parapolitics*. Tidak berbeda dengan *archipolitics*, *parapolitics* juga merupakan bentuk daripada polis. Seperti yang telah dikutip di atas, konflik dalam politik diterima tetapi untuk direformulasikan ke dalam bentuk yang lebih lunak. Hal ini berarti di dalam *parapolitics* tidak ada sikap tidak setuju dan tidak ada sikap menentang sebagaimana yang seharusnya ada sebagai tindakan politik, jadi *parapolitics* berujung pada kesetaraan pasif.

Ketiga, yaitu *metapolitics* yang berakar dalam pikiran Marxist. Menurut Robertus Robet, "*Metapolitics* pada dasarnya adalah bentuk pengingkaran terhadap 'yang politis' karena kebenaran akan politik sering ditempatkan atau dicari di tempat lain, 'di luar sana', jauh melampaui politik."²⁷ "*In the modern of 'political philosophy' apparatus, the truth of politics is no longer located above politics as its essence or idea. It is located beneath or behind it, in what it conceals and exist only to conceal*" (Dalam mekanisme modern dari 'filsafat politikal', pada kenyataannya adalah politik tidak lagi diartikan diatas politik dalam arti yang sesungguhnya. Politik diletakkan jauh dibawah, atau dibalik dari makna sebenarnya, dalam hal apapun yang tersembunyi dan ada hanya untuk menyembunyikan)²⁸. "*The 'end of politics' is the ultimate phase of metapolitical interference, the final affirmation of the emptyness of its truth. the 'end of politics' is the completion of political philosophy*" ('Akhir dari politik' adalah tahap yang paling terakhir dari gangguan *metapolitics*, penegasan akhir akan kekosongan dari kebenarannya. 'Akhir dari politik' adalah tamatnya filsafat yang politis).²⁹ Menurut Marxist seluruh relasi politik tidak lebih dari sekadar refleksi dari kepentingan dan relasi-relasi dalam mode produksi. Maka politik bukanlah perkara utama, ia hanya merupakan etalase saja dari kepentingan relasi produksi dominan. Bila dalam *archipolitics* ada banyak ketidaksetaraan dalam setiap tempat karena pengklasifikasian di dalamnya; *parapolitics* juga menunjukkan ketidaksetaraan karena ada yang dikorbankan, untuk membuat perintah yang membutuhkan

²⁷Hardiman, F. Budi, dkk. *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta: www.srimulyani.net, 2010. Hlm 39.

²⁸Rancière. 1999. op. cit. Hlm. 82.

²⁹May. op. cit. Hlm. 45.

kompromi; dan *metapolitics* meninggalkan bidang perjuangan politik untuk kesetaraan atas nama elemen non-politik. Dan sebagai lawan dari ketiga kategori tersebut. Sama seperti *archipolitics* dan *parapolitics* yang merupakan bentuk daripada polis. Di dalam *metapolitics*, kebenaran politik dicari jauh melampaui politik, sedangkan menurut Rancière, kebenaran akan politik adalah tindakan politik itu sendiri. Jadi galibnya, ketiga kritik Rancière terhadap filsafat politik dari ketiga filsuf di atas – Plato, Aristoteles, dan Karl Marx – tadi merupakan bentuk dari polis yang mana kesetaraan di dalamnya adalah kesetaraan pasif.

Rancière memunculkan pemikirannya yang ia sebut ‘politik’ (*politics*), yang berusaha untuk menghadirkan subyek-subyek yang sebelumnya tidak dapat berpartisipasi ikut serta sebagai subyek politik di dalam polis. Politik merupakan lawan dari polis (*police*). Polis adalah bentuk politik yang umum saat ini. Pemikirannya ini muncul setelah ia melakukan penelitian empirik terhadap kehidupan intelektual kelas pekerja antara tahun 1830-an hingga 1840-an. Ia menemukan bahwa kebanyakan para pekerja tidak terlalu banyak mengeluhkan kesulitan hidup karena alasan-alasan material, tetapi lebih pada persoalan kualitas hidup yang rendah akibat ketatnya hierarki sosial di dalam masyarakat. Ketatnya hierarki dalam masyarakat ini menciptakan kondisi ketidaksetaraan, dan Rancière ingin agar setiap manusia bertindak aktif memperjuangkan kesetaraannya.

3.2. Konsep Ketidaksetaraan dan Kesetaraan Jacques Rancière

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketidaksetaraan terjadi ketika praktik-praktik polis dalam masyarakat telah mengklasifikasi sekaligus menyingkirkan subyek atau kelompok keluar dari sistem dan masuk ke dalam ‘bagian yang tak memiliki bagian’. Dalam kondisi inilah kemampuan subyek atau kelompok dalam berpikir dan berbahasa telah dibatasi oleh subyek atau kelompok lainnya. Mereka yang menjadi ‘bagian yang tak memiliki bagian’ ini tidak hanya tersingkirkan namun juga dengan sengaja dibungkam untuk melanggengkan kekuasaan yang ingin dicapai oleh subyek yang menyingkirkannya dari sistem. Kondisi di atas bahkan dapat ditemukan dalam sistem demokrasi sekalipun. Demokrasi yang secara umum dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, nyatanya seiring dengan

perkembangannya menjadi bentuk pemerintahan yang konsensus melalui perhitungan suara terbanyak. Ada pembuatan norma-norma yang dimaksudkan untuk mencegah serta menghindari konflik dan menciptakan kesetaraan, nyatanya malah menciptakan kondisi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pengorbanan kepentingan beberapa subyek yang bermoduskan demi kepentingan bersama, yang gamblangnya dapat disebut kepentingan kelompok mayoritas.

Melihat kondisi ketidaksetaraan, sudah tentu yang ingin dicapai adalah sebuah kondisi yang lebih baik, yaitu kesetaraan. Bagi Rancière, pada dasarnya setiap individu itu setara. Dikatakan setara karena setiap individu memiliki kemampuan dalam berpikir dan berbahasa. Kesetaraannya untuk subyek ‘bagian yang tak memiliki bagian’ yang tersingkirkan dari sistem, supaya dapat berpartisipasi aktif dalam merebut posisi politiknya di dalam sistem. Rancière tidak mendasarkan konsep kesetaraannya dari organ tertentu, melainkan pada tindakannya mengembangkan intelegensinya dalam berpikir dan berbahasa. Kemampuan dalam berpikir dan berbahasa ini bahkan juga dimiliki oleh kaum penyandang cacat sekalipun, yang mana bagi orang awam tentu berpikir bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki oleh kaum penyandang cacat akan sulit mendapatkan akses untuk mempraktikkan kekuasaannya sebagaimana yang dilakukan oleh manusia normal. Bertolak belakang dengan hal tersebut, Rancière tetap beranggapan bahwa pada dasarnya kemampuan setiap manusia dalam berpikir dan berbahasa adalah setara, walaupun dalam hal ini memang tidak secara gamblang menjelaskan bentuk kesetaraan yang ia maksudkan. Anggapan Rancière diatas dapat lebih dijelaskan melalui pembagian konsep kesetaraannya. Ia membagi pemikirannya tentang kesetaraan menjadi dua, yaitu kesetaraan aktif (*active equality*) dan kesetaraan pasif (*passive equality*). Kesetaraan aktif adalah perjuangan untuk merampas kesetaraan, sedangkan kesetaraan pasif berarti menunggu kesetaraan diberikan oleh sistem politik.

3.2.1. Kesetaraan Aktif (*Active Equality*)

Bagi Rancière, Kesetaraan aktif adalah perjuangan untuk merampas kesetaraan. Yang diinginkannya adalah agar setiap subyek dapat berpikir aktif dan

kreatif dalam memandang kesetaraan sehingga mampu mematahkan rezim yang sudah ada selama ini. Rancière ingin agar manusia melakukan tindakan sebagai subyek politik dalam masyarakat untuk dapat merampas kesetaraannya, inilah yang ia maksud dengan kesetaraan aktif. Kesetaraan aktif berarti subyek berpartisipasi aktif melakukan tindakan politik di dalam sistem. Berpartisipasi aktif tidak perlu dilakukan secara sadar, namun juga dapat dilakukan secara tidak sadar. Hal ini berarti berpartisipasi aktif tidak perlu secara sadar dalam merebut kesetaraan. Contohnya, peristiwa Mei 1968 di Perancis yang mana pada saat itu terjadi gerakan memprotes kebijakan pemerintahan De Gaulle melalui aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan para buruh. Mahasiswa dan para buruh yang melakukan demonstrasi saat itu secara tidak sadar juga berpartisipasi aktif merebut kesetaraan untuk seluruh warga negara. Meminjam bahasa Marx, berpartisipasi aktif juga merupakan gerak kolektif. Peristiwa Mei menunjukkan bahwa demonstrasi merupakan gerakan kolektif yang juga merupakan partisipasi aktif merebut kesetaraan.

3.2.2. Kesetaraan Pasif (*Passive Equality*)

Menurut Rancière, kesetaraan pasif bukanlah politik, melainkan *policing*. Kesetaraan pasif berarti subyek tidak berpartisipasi aktif dalam merebut kesetaraannya. Kesetaraan pasif adalah kesetaraan yang diberikan oleh sistem. Pemerintah memang mengakui adanya keragaman, namun tetap mengklasifikasikan subyek mengatur peran serta posisinya. Suatu kondisi yang berbeda-beda, memang tidak hanya berupa satu bentuk klasifikasi, namun subyek tetap dikategorikan. Contohnya, orang Cina menjadi pedagang, orang Italia menjadi mafia, orang Inggris menjadi pengusaha. Adanya pengakuan terhadap keragaman di atas tetap saja menunjukkan adanya pengklasifikasian di dalam masyarakat. Kesetaraan pasif inilah yang sebelumnya dijelaskan Rancière dalam *arkhepolitics*, dimana setiap subyek telah ditempatkan dalam tembok yang rigid untuk menempati peran serta posisinya masing-masing yang telah diberikan.

Kesetaraan bagi Rancière bukan merupakan sebuah ideal dengan isi substantif tertentu dan tidak dapat dipahami sebagai distribusi aritmatik dalam konsep hak yang umum. Esensi kesetaraan tidak terdapat dalam persamaan dan

kesatuan kepentingan, melainkan dalam tindakan subyektivisasi untuk mematahkan tatanan sensibilitas. Mengutip perkataan Rancière, bahwa *“The essence of equality is not so much to unify as to declassify, to undo the supposed naturalness of orders and replace it with the controversial figures of divisions”* (Esensi dari kesetaraan bukan banyak mempersatukan sebagai deklasifikasi, untuk membatalkan tertib-tertib yang dianggap sudah ada dan menggantinya dengan gambaran-gambaran pemisahan yang kontroversial).³⁰ Hal ini berarti kesetaraan bukan dicapai melalui modus-modus tindakan yang mempersatukan keragaman dalam masyarakat, melainkan dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai wujud dari disensus pada tertib sistem yang berlaku. Kesetaraan bukanlah sebuah tujuan, melainkan merupakan sesuatu yang dipandang secara aksioma. Kesetaraan bersifat universal atas usahanya merangkul ‘bagian yang tak memiliki bagian’ dalam ketegangan antara politik dan polis. Namun bukanlah pendasaran yang metafisis semata, tetapi merupakan pendasaran yang ia dapat melalui observasi empiris bahwa kesetaraan didapat dari pendasaran antropologis bahwa semua manusia terlahir memiliki intelegensi yang sama, dengan modal dapat berpikir dan berbahasa. Rancière berusaha menegaskan bahwa mereka – bagian yang tak memiliki bagian – yang tersingkirkan dari dalam sistem juga memiliki kekuasaan untuk mencapai kesetaraan. Jelaslah bahwa konsep kesetaraan Rancière bukan pada kesamaan dalam segala hal, juga bukan penyatuan keanekaragaman dalam sistem, tetapi menurutnya dengan kemunculan ‘bagian yang tak memiliki bagian’ ini untuk kembali menempati posisinya di dalam sistem politik demokrasi. Kesetaraan baginya berarti mengembalikan mereka yang tersingkirkan – bagian yang tak memiliki bagian – untuk berpartisipasi aktif merebut kesetaraan.

3.2.3. *Le Part Sans – Part* (Bagian Yang Tak Memiliki Bagian)

Rancière membahasakan mereka yang terpinggirkan dari sistem dengan sebutan *‘le part sans – part’*, yang bila diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi *‘the part that has no part’* dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ‘bagian yang tak memiliki bagian’. ‘Bagian yang tak memiliki bagian’ adalah subyek yang tersingkirkan dari sistem sebagai hasil dari skandal demokrasi sebagai

³⁰Rancière. 1992. op. cit. Hlm. 32.

praktik polis yang terjadi di masyarakat. Secara umum, ‘bagian yang tak memiliki bagian’ lebih dianggap sebagai subyek minoritas yang mengalami perlakuan diskriminatif. Saat subyek yang terdiskriminasi menjadi ‘bagian yang tak memiliki bagian’, maka disitulah muncul ketidaksetaraan di dalam masyarakat pluralis demokrasi. Mereka dengan sengaja disingkirkan dan dibungkam oleh subyek lain agar keberadaannya tetap tidak ‘diperhitungkan’ serta tidak mengancam mereka yang melakukan penyingkiran. ‘Bagian yang tak memiliki bagian’ dengan sengaja disingkirkan sehingga hak partisipasinya sebagai warga negara tidak dihitung.

Saat ini memang sepertinya masih terlihat adanya praktik-praktik yang tetap memperlihatkan adanya demokrasi di dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, mereka adalah rakyat yang telah mengalami ‘sterilisasi.’ Karena adanya penyingkiran ini, maka kebebasan berpendapat pun dipertanyakan. Demokrasi yang seharusnya menjadi sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat ini malah memunculkan kondisi ketidaksetaraan di dalam rakyat itu sendiri. Ketidaksetaraan ini berkaitan dengan situasi dimana masalah serta agenda demokrasi dikendalikan oleh mereka-mereka yang memiliki kekuasaan lebih besar – termasuk kaum elit maupun pejabat pemerintahan – menyalahgunakan kekuasaan mereka (skandal demokrasi).

Adanya penyikiran subyek sehingga menjadi subyek ‘bagian yang tak memiliki bagian’ ini terjadi karena adanya skandal demokrasi. Demokrasi seharusnya mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai subyek politik. Seiring perkembangannya, nyatanya semua tatanan sosial ditandai dengan hierarki dan dominasi yang dilakukan oleh mereka yang memerintah kepada mereka yang diperintah sehingga semua rezim politik pun merujuk pada ketidaksetaraan. Skandal demokrasi tidak merujuk pada sebuah skandal yang terjadi di dalam sistem demokrasi, tidak juga pada beberapa insiden *non-necessary* yang akan merusak sistem demokrasi, dengan demikian tidak dengan jenis skandal yang menandai adanya politik tertentu. Sebaliknya, skandal demokrasi adalah ‘skandal yang demokrasi’.

Skandal demokrasi terjadi melalui kesalahan hitung yang terjadi akibat pihak-pihak yang eksis mengangkat dirinya demi mencapai keuntungan sepihak,

namun sekaligus mengusir mereka yang dianggap lemah dalam sistem. Ketika demokrasi dijalankan, demokrasi tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat dalam arti yang sebenarnya melainkan telah berganti menjadi kepentingan ‘rakyat’ telah disterilisasi oleh pihak-pihak yang merasa memiliki kekuasaan lebih kuat. Mereka yang berkuasa dalam memerintah berusaha terus menekan pihak-pihak yang lemah. Hal inilah yang menjadikan makna dari demokrasi telah bergeser dari makna yang sebenarnya. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam kehidupan politiknya inilah yang disebut sebagai ‘bagian yang tak memiliki bagian’. Menurut Rancière, “*Politics arises from a count of community ‘parts’, which is always a false count, a double count or a miscount*” (Politik tumbuh dari perhitungan ‘bagian-bagian’ kelompok dimana selalu terjadi perhitungan yang salah, perhitungan ganda, ataupun kesalahan hitung).³¹ Jadi yang diinginkan oleh Rancière adalah intervensi terhadap sistem yang mengklasifikasikan subyek serta memunculkan kembali subyek ‘bagian yang tak memiliki bagian’ yang disembunyikan dalam ilusi kesetaraan, agar dapat berpartisipasi aktif sebagai subyek politik dalam merebut kesetaraan.

3.3. Polis versus Politik

Ditinjau dari ruang gerak kegiatannya, sesungguhnya politik itu muncul bersamaan dengan berdirinya suatu Negara, namun pada saat negara tersebut berdiri, kegiatan politik ini belum memiliki pengetahuan yang tinggi. Seiring dengan berkembangnya peradaban serta ilmu pengetahuan yang semakin maju ini pun juga turut memajukan kegiatan politik yang mulai terasa perkembangannya di berbagai bidang kehidupan yang sangat diperlukan oleh setiap negara. Pandangan fungsionalisme memandang masyarakat dan sistem politik selalu berada dalam keseimbangan dan konsensus, dan oleh karena itu mereka berada kondisi yang stabil. Sedangkan pandangan konflik memandang masyarakat dan sistem politik akan selalu tetap berada dalam keadaan ketidakseimbangan yang penuh konflik, karena itulah kondisinya tidak pernah stabil.

Rancière, dalam pemikirannya secara umum, membahasakan dua bentuk politiknya dengan sebutan ‘*politics* (politik)’ dan ‘*the police* (polis)’. Rancière

³¹Rancière. 1999. op. cit. Hlm. 6.

membahaskan politik yang selama ini dipahami sebagai praktik-praktik yang mengklasifikasikan subyek ke dalam kelas-kelas dengan sebutan *'the police'*, sedangkan 'politik' sebagai lawan dari polis dibahasakannya dengan sebutan *'politics'*. "... *the term politics for an extremely determined activity antagonistic to policing*" (... istilah kata politik sangat bertentangan ditentukan aktivitas antagonistik *policing*).³²

"These are generally confused with politics whereas political activity is none other than the activity that parcels them out. Politics is generally seen as the set of procedures whereby the aggregation and consent of collectivities is achieved, the organization of powers, the distribution of places and roles, and the system of distribution and legitimization another name. I propose to call it the police"

Biasanya ini membingungkan dalam politik, dimana kegiatan politik tidak lain adalah kegiatan yang mengikat mereka. Pada umumnya politik dilihat sebagai serangkaian prosedur dimana agregasi dan persetujuan dari kolektivitas dapat dicapai, organisasi kekuasaan, distribusi tempat dan tugas, dan nama lain dari sistem distribusi dan legitimasi. Saya mengusulkan untuk menyebutnya polis.³³

Berbeda dengan para pemikir postmoderen lainnya yang sering menggunakan bahasa 'yang politis' atau 'politik' sebagai lawan dari politik yang berlaku secara umum, karena menurut Rancière, polis dan politik merupakan modus operandi. Keduanya berada pada dataran ontis. Sedangkan pada pemikir postmoderen, politik yang berlaku secara umum berada pada dataran ontis, sedangkan 'yang politis' atau 'politik' berada pada dataran ontologis. 'Yang politis' atau 'politik' seolah-olah hendak berbicara tentang faktisitas, bahwa hal tersebut tidak dapat dirubah.

Secara umum politik dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Berpolitik berarti ikut membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam mengejar tujuan bersama. Subyek-subyek dalam politik diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas yang berarti hal ini mengakibatkan setiap subyek tidak dapat mengakses politik dengan bebas, karena hanya subyek-subyek tertentu saja yang

³²Rancière. 1999. op. cit. Hlm. 29.

³³Ibid. Hlm. 28-29.

dapat mengaksesnya. Menurut Rancière, *“Politics is specifically opposed to the police. The police is a ‘partition of the sensible’ (le partage du sensible) whose principle is the absence of a void or a supplement”* (Politik berdiri berlawanan dari polis. Polis adalah distribusi sensibilitas (*le partage du sensible*) yang pada prinsipnya adalah ketidakhadiran sebuah ruang kosong atau sebuah pelengkap).³⁴

Polis dipahami sebagai praktik kekuasaan atau penubuhan kehendak serta kepentingan yang mensyaratkan adanya subyek yang saling terbelah dan terbagi ke dalam hierarki dalam sebuah ruang bersama (*common world*) yang nyata. Polis juga sekaligus membentuk partisi di dalam masyarakat dalam hal pengambilan keputusan. Akibatnya, polis menyingkirkan subyek yang dianggap tidak memiliki kapabilitas yang sama untuk keluar dari sistem. Rancière menyebut mereka yang tercecer dari sistem dengan sebutan *“le part sans – part”* (bagian yang tak memiliki bagian). Mereka tersingkirkan dari sistem akibat *policy of logic* yang menciptakan bentuk-bentuk partisi di masyarakat dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan, inilah yang disebut dengan ‘distribusi sensibilitas’. Distribusi sensibilitas dipahami sebagai sebuah persepsi yang di dalamnya terdapat pengelompokan pengertian. Dimana di satu sisi terus meraih kesetaraan dalam pengambilan peran posisi, di sisi lain terus melakukan pembatasan peran bagi individu-individu yang tidak memiliki kemampuan yang sama dalam berpolitik.

“The distribution of sensible reveals who can have a share in what is common to community based on what they do and on the time and space in which this activity is performed... it defines what is visible or not in a common space, endowed in a common language, etc. There is thus an ‘aesthetics’ at the core of politics that has nothing to do with Benjamin’s discussion of the ‘aestheticization of politics’ specific to the ‘age of the masses’... it is a delimitation of spaces and times, of the visible and the invisible, of speech and noise, that simultaneously determines the place and the stakes of politics as a form of experience. Politics revolves around what is seen and what can be said about it, around who has the ability to see and the talent to speak, around the properties of spaces and the possibilities of time”

Distribusi sensibilitas menentukan siapa yang memiliki bagian dari apa yang dimiliki bersama dalam masyarakat berdasarkan pada apa yang mereka lakukan, kapan, dan dimana aktivitas tersebut dilakukan... ia mendefinisikan apa yang terlihat atau tidak terlihat dalam ruang bersama,

³⁴May. op. cit. Hlm. 47.

disokong dengan bahasa bersama, dsb. dengan demikian terdapat sebuah estetika" pada inti politik yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut dalam diskusi Benjamin tentang estetisasi politik" tepatnya pada era masifikasi"... ini merupakan sebuah delimitasi ruang dan waktu, dari yang terlihat dan tak terlihat, yang terdengar dan tak terdengar, yang secara serempak mendeterminasi tempat dan taruhan politik sebagai sebuah bentuk pengalaman. Politik berkisar diantara apa yang terlihat dan apa yang bisa dikatakan tentangnya, diantara siapa yang memiliki kemampuan untuk melihat dan bakat untuk berbicara, diantara properti ruang dan posibilitas waktu.³⁵

Polis mengklasifikasi manusia dengan tata cara dan kuasanya. Polis juga bermaksud menghindari konflik melalui praktik konsensus. Demokrasi sebagai proses konsensus sebenarnya hanya akan menghasilkan apa yang dinamakan dengan ilusi kesetaraan. Dan tujuan dari polis adalah bahwa subyek 'bagian yang tak memiliki bagian' tetap tidak menunjukkan partisipasinya sebagai subyek politik dalam masyarakat.

Bila polis adalah politik status quo, lain halnya dengan politik. Politik dipahami kontras dengan polis. Politik adalah lawan dari polis, yaitu segala aktivitas yang memutuskan keterkaitan dengan polis dengan menemukan subyek baru. Rancière mengkarakterisasikan politik sebagai disensus, "*The essence of politics is a dissensus*" (Esensi dari politik adalah disensus)³⁶. Tujuan dari politik adalah menghadirkan 'bagian yang tak memiliki bagian' kembali ke dalam sistem untuk berpartisipasi sebagai subyek politik. Bagi Rancière, segala sesuatu mengenai politik terkandung dalam hubungan khusus antar subyek yang ada di dalamnya. Sebuah hubungan dimana subyek ikut mengambil peranan (*part-taking / avoir part*) dalam kehidupan politik bersama.

"Politics is not the exercise of power. Politics ought to be defined on its own terms, as a mode of acting put into practice by a specific kind of subject and deriving from a particular form of reason. It is the political relationship that allows one to think the possibility of a political subject(ivity) [le sujet politique] not the other way around"

Politik bukanlah praktik kekuasaan. politik harus dipahami sebagai modus dari penempatan tindakan ke dalam praktik oleh subyek khusus dan diturunkan dari bentuk nalar tertentu. Hubungan politiklah yang

³⁵Rancière, Jacques. *The Politics of Aesthetics: The Distribution of The Sensible*. Terj. Gabriel Rockhill. London: Continuum, 2004. Hlm. 12.

³⁶May. op. cit. Hlm. 46.

meleluaskan seseorang memikirkan kemungkinan dari subyek(tivitas) politik dan bukan sebaliknya.³⁷

Kutipan di atas menjelaskan bahwa politik bukanlah praktik kekuasaan. Kekuasaan cenderung mengatur dan kekuasaan membuat klasifikasi. Politik bertugas untuk mengacaukan aturan karena setiap bagian di dalam polis telah dihitung. Hal tersebut bertentangan dengan Rancière, menurutnya, tidak ada distribusi sensibilitas yang dapat menghitung seluruhnya. Selalu ada bagian yang tidak dihitung, karena dalam demokrasi memang akan selalu ada yang tercecer. Ketika subyek yang tidak dihitung (bagian yang tak memiliki bagian) mencoba merebut tempat di dalam sistem agar kembali dihitung dan kembali menjadi bagian dari sistem, disaat itulah dinamakan *political subjectivity*. *Political subjectivity* adalah momen. Momen dimana subyek ‘bagian yang tak memiliki bagian’ mencoba untuk merebut tempatnya di dalam sistem. Ketika subyek telah dihitung kembali di dalam bagian sistem maka ia bukan lagi *political subjectivity*, melainkan subyek tersebut sudah menjadi bagian dari polis. *Political subjectivity* tidak ada lebih dulu, tetapi kehadirannya dimungkinkan oleh adanya relasi politik. *Political subjectivity* tidak terjadi secara alami begitu saja. Jadi pada galibnya, permasalahan politik dan polis adalah permasalahan yang tidak akan pernah selesai (infinitum).

Politik tak hanya berkaitan dengan prosedur kekuasaan, bagaimana ia diraih, dijalankan atau pun dipertahankan. Ada etika-etika yang mendasarinya, jika tidak maka akan terjebak pada permainan kekuasaan saja atau keadaan serta kondisi yang *chaos*. Untuk itu, etika politik menjadi penting dibahas di tengah perkembangan politik mutakhir yang hanya mementingkan prosedur dan akrobat kekuasaan. Etika-etika politik seperti dasar-dasar kesetaraan, komitmen, kebersamaan dalam ruang publik, pengakuan terhadap yang lain justru lenyap di tengah hingar-bingar ‘pesta politik’ ini. Etika politik yang memadai, ikhtiar memperjuangkan “yang baik” dalam kehidupan bersama, niscaya mengandung makna politik di dalamnya. dan etika politik yang sungguh-sungguh selalu merupakan penimbangan ulang politik sebagai usaha mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan kehidupan bersama.

³⁷Rancière, Jacques. *Dissensus: on Politics and Aesthetics*. New York: Continuum, 2010. Hlm. 27.

Dengan pandangan-pandangan itu maka esensi dari politik adalah upaya untuk menginterupsi atau mematahkan distribusi sensibilitas sebagai akibat yang ditimbulkan oleh polis, dengan menyodorkan atau mengukuhkan kembali kehadiran mereka yang masuk ke dalam ‘bagian yang tak memiliki bagian’ – seperti kaum seniman, buruh, dan pengemis – untuk kembali mengambil tempat di dalam masyarakat. Inilah inti dari politik yang diungkapkan oleh Rancière, bahwa politik berupaya menemukan cara untuk meletakkan mereka – bagian namun bukan bagian – kembali ke posisinya masing-masing untuk memperjuangkan kesetaraannya.

“Politics only occurs when these mechanisms are stopped in their tracks by the effect of a presupposition that is totally foreign to them yet without which none of them could ultimately function: the presupposition of the equality of anyone and everyone”

Politik hanya terjadi ketika mekanisme ini berhenti di jalur mereka dikarenakan efek dari perkiraan yang sama sekali asing bagi mereka dan tanpa satu pun dari mereka yang dapat berfungsi: anggapan dari persamaan dari siapapun dan setiap orang.³⁸

Dari pemikiran Rancière tentang politik ini dapat dipahami bahwa perhatian utamanya bukanlah pada formulasi kesepakatan atau penjaminan tatanan, namun lebih kepada penemuan kebaruan melalui modus-modus ‘tak resmi’ yang mendorong ketidaksetujuan dan perubahan yang dilakukan oleh subyek ‘bagian yang tak memiliki bagian’. Kesetaraan tidak dapat dipahami secara pasif, tidak juga dapat dipahami sebagai pengandaian metafisik, model, maupun distribusi aritmatik, melainkan sebagai tindakan untuk menerobos semua hierarki sensibilitas yang dibuat oleh sistem. Rancière beranggapan bahwa setiap subyek dapat berpikir dan berbahasa, karena berpikir dan berbahasa mampu melelehkan segala regulasi serta menantang segala bentuk klasifikasi sosial.

Menurut Rancière, kelas yang paling radikal bukanlah kelas yang menginginkan adanya perubahan yang mutlak dalam hierarki sosial, namun justru kelas yang berada dalam situasi atau posisi ‘migrasi’, kelas yang berada dalam wilayah perbatasan yakni mereka yang memiliki ideal yang melampaui batasan-batasan materialnya. Apa yang dimaksud Rancière dengan ‘migrasi’? migrasi

³⁸Rancière. 1999. op. cit. Hlm. 17.

adalah gerak setiap subyek untuk melampaui batasan-batasan seperti sosial, ekonomi maupun kebudayaan yang menempatkannya pada posisi tertentu yang statis. Dari pandangan ini kita mendapatkan keterangan, bahwa percobaan untuk mengubah keadaan, tidak dapat dilakukan melalui penolakan karena situasi. Tembok dan hierarki sosial tidak dapat dilampaui dengan melawan suatu kebudayaan, melainkan harus dengan sebuah perlintasan kebudayaan. Praktik kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh subyek kelas tertentu untuk melintasi hierarki sosial, inilah yang disebut Rancière sebagai ‘migrasi’. Mereka sebagai subyek yang dengan keterbatasan materialnya namun dapat melakukan perlintasan kebudayaan. Memandang dari segi makna perlintasan kebudayaannya itu lah yang lebih penting. Seorang anggota kelas pekerja yang belajar bagaimana menulis dan menyusun sebuah syair yang cocok untuk jamannya barangkali jauh lebih mengancam keutuhan tatanan ideologis ketimbang mereka yang menyanyikan lagu-lagu revolusioner. Memahami hal tersebut berarti harus kembali memahami makna politik dan migrasi dalam Rancière, apabila politik adalah interupsi kepada tembok dan distribusi sensibilitas maka jelas tujuan dari politik pertama-tama adalah perubahan pada posisi hierarki suatu tatanan. Dari hal ini maka yang dipentingkan adalah ‘gerak’ atau migrasi dari status sosial (buruh atau borjuis misalnya) ke status sosial lainnya sambil menghancurkan tembok dan hirarki sosial dalam rezim sensibilitas itu. Seorang buruh yang membaca dan menyusun sebuah syair barangkali bukanlah pekerja dengan obsesi mengenai pembalikan struktur kapitalis, tetapi justru melalui kegiatan itu ia sebenarnya telah bergerak melintasi struktur dan ketetapan yang semula digariskan oleh standar ideologi kapitalis. Proses kegiatan estetik itu memperlihatkan buruh yang menerobos ‘tatanan higienis’ yang diciptakan oleh sistem yang telah menempatkannya dalam posisinya. Melalui hal tersebut dapat terlihat bahwa ia mengacaukan tertib yang telah dibuat sebelumnya, bahwa ‘kelas pekerja’ hanya patut bekerja pada tempatnya sementara urusan estetika dikerjakan oleh para seniman.

Pertanyaan yang muncul di sini adalah, apa yang memungkinkan subyek untuk melintasi serta mendobrak struktur atau hierarki sosialnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Rancière mengatakan bahwa

“There is politics when there is a part of those who have no part, a part or party of the poor. Politics does not happen just because the poor oppose

Universitas Indonesia

the rich. It is the other way around: politics (that is the interruption of the simple effect of domination by the rich) causes the poor to exist as an entity. Politics exist when the natural order of domination is interrupted by the institution of a part of those have no part”

Adanya politik bagian yang tidak memiliki bagian, bagian atau kaum miskin. Politik tidak selalu terjadi hanya karena si miskin berlawanan dengan si kaya. Hal ini bersifat sebaliknya: politik (yang mana adalah interupsi dari efek sederhana akibat dominasi si kaya) menyebabkan si miskin untuk hadir sebagai kesatuan. Politik hadir ketika dominasi tertib umum diganggu oleh institusi bagian yang tak memiliki bagian.³⁹

Dengan demikian asumsi dasar yang dipergunakannya untuk mengukuhkan kemampuan menggeser tembok yang dibangun Plato sungguh sangat sederhana, yaitu setiap orang mampu berpikir dan berbahasa karena pikiran mampu melelehkan segala regulasi dan menantang segala bentuk klasifikasi sosial untuk menghancurkan setiap modus distribusi kelas, tempat dan norma-norma. Distribusi sensibilitas membuat klasifikasi mengeras, dan tindakan politik untuk mematahkan distribusi sensibilitas tidak hanya berhenti pada ketidaksetujuan dan penentangan terhadap sistem, tetapi melalui tindakan merebut kembali posisi aktifnya dengan cara melakukan migrasi kelas, yang mana hal ini disebut Rancière ‘deklasifikasi’.

3.4. Pembongkaran Rezim Partisi dalam Masyarakat Pluralis Demokrasi

Selama ini, permasalahan ekonomi dianggap sebagai pemicu utama timbulnya ketidaksetaraan, yang akhirnya turut memberikan dampak bagi bidang lainnya. Namun penulis memiliki pandangan yang berbeda, bukan permasalahan ekonomi melainkan justru permasalahan kebudayaan. Permasalahan kebudayaan tidak hanya sebatas lingkup adat istiadat atau perbedaan suku, namun adanya doktrin-doktrin atau *stereotype* serta pergeseran makna bahasa lah yang memicu terjadinya ketidaksetaraan. Lihat saja di beberapa negara saat ini, berapa banyak manusia yang percaya bahwa nasib mereka bergantung pada sang penguasa yang menjalankan pemerintahan, atau berapa banyak perempuan yang walaupun telah mendapatkan akses untuk turut berpartisipasi di dalam ruang publik namun tetap tidak diberikan kesempatan yang sama seperti yang diterima oleh laki-laki karena

³⁹Rancière. 1999. op. cit. Hlm. 11.

adanya doktrin bahwa ‘kodrat perempuan hanyalah berada dalam ruang privat, mengurus suami dan anak’. Mereka yang menganggap memiliki kemampuan dalam berpikir serta berbahasa lebih baik dengan mudahnya mampu menyingkirkan subyek-subyek yang dianggap tidak memiliki kemampuan yang sejajar dengan mereka. Banyak keputusan atau kebijakan yang dibuat melalui kesalahan hitung, tanpa ‘menghitung’ suara masyarakat yang utuh. Kepentingan serta hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai warga negara, dengan sengaja dikubur dan suara mereka pun dibungkam demi kepentingan segelintir manusia. Mereka yang sengaja disingkirkan ini seperti dibungkam dengan doktrin bahwa pada akhirnya hukum alam yang berlaku, ‘siapa yang lebih kuat maka ia lah yang akan menang’. Mereka yang tersingkirkan lebih memilih untuk tidak melawan karena di dalam pikiran mereka, mereka tidak mampu mendobrak rezim yang telah berlangsung selama ini. Doktrin semacam ini harus dihapus, didobrak dengan keyakinan menginginkan adanya perubahan yang lebih baik, untuk dapat turut berpartisipasi sebagai warga masyarakat yang sah dengan segala hak serta kewajiban perannya masing-masing. Anggapan inilah yang sudah menjadi budaya di banyak negara. Adanya budaya *pen-stereotype-an* secara tidak langsung turut mempengaruhi penyingkiran mereka. Kelompok yang tersingkirkan tidak dapat berpikir dan berbahasa dengan maksimal karena pikiran-pikiran mereka telah ditutup oleh ‘doktrin’ yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengubah rezim. Permasalahan kebudayaan ini pun akhirnya turut mempengaruhi bidang-bidang lainnya, seperti dalam bidang ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya menciptakan partisi dan hierarki sebagai jarak antar subyek.

Penyingkiran-penyingkiran yang terjadi membuat celah bagi ‘kesalahan hitung’ (*miscount*) di dalam demokrasi semakin besar. Praktik-praktik politik yang rutin serta konvensional terus berupaya untuk menyembunyikan kesalahan hitung tersebut. Kesalahan hitung dalam demokrasi muncul ketika institusi dan formalisasi politik yang eksis mendefinisikan dirinya, namun sekaligus menyingkirkan mereka yang lemah dalam masyarakat. Apa yang dinyatakan secara normatif oleh instalasi demokrasi resmi sering kali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Walaupun normativitas demokrasi di Indonesia secara formal mengagungkan ‘kedaulatan rakyat’. Namun sekali lagi, makna dari rakyat itu

sendiri sebenarnya adalah ‘rakyat’ yang sudah mengalami ‘sterilisasi’. Karena yang terlemah di dalam masyarakat tidak turut dimasukkan sebagai ‘rakyat’. Sebagai contohnya, kaum minoritas yang mengalami gangguan dan kekerasan, kelompok gay dan lesbian yang mengalami diskriminasi, kaum miskin di perkotaan, suku terasing di pedalaman, serta kaum wanita di ranah publik. Kata rakyat dalam formalisasi demokrasi adalah rakyat sejauh yang diterima dalam konsensus. Di titik ini lah reputasi demokrasi secara ironis berjalan seiring dengan ‘pengusiran’ mereka yang lemah dalam masyarakat. Pengusiran ini belum lagi menghitung mereka yang juga tersisihkan atau mengalami pemburuan akibat ketidakmerataan dalam diskursus. Ketidakmerataan ini berkaitan dengan situasi dimana masalah dan agenda demokrasi dikendalikan oleh para kaum elite, kaum kaya, dan sekaligus industrialis media. Penataan agenda ini nyaris membuat ‘kebebasan berpendapat’ yang ideal menjadi *absurd*. Karena ‘kebebasan berpendapat’ tidak lebih hanya menjadi sekadar etalase dari industri opini-opini yang dikendalikan oleh politisi pemilik media untuk memenangkan kepentingan mereka masing-masing.

Dengan melihat situasi ironi dalam demokrasi seperti ini lalu muncul pertanyaan di benak masing-masing individu yang masih peduli akan pencapaian kesetaraan, apa yang masih bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan? Apakah masih mungkin sesuatu dilakukan melalui apa yang tersedia dalam matriks kepolitikan yang ada? Mengenai politik, Rancière menganjurkan agar kita kembali membedakan politik sebagai lawan dari polis. Polis adalah segala aktivitas kekuasaan yang rutin, yang disengaja dengan maksud-maksud tertentu. Polis yang rutin ini memang dimaksudkan untuk membangun klasifikasi, partisi, dan hierarki sehingga oleh karenanya ia pasti menyembunyikan ketidaksetaraan. Inilah bentuk politik (politik yang dikenal secara umum) yang ditandai dengan ‘kesalahan hitung’. Meski demikian, polis tidak bisa begitu saja dimusnahkan. Polis memang menjadi penampang harian dari eksistensi kepolitikan normal. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan terus menerus mengungkapkan apa yang disembunyikannya dan berupaya sekuat mungkin menghadirkan mereka yang diusir dan disembunyikannya untuk merebut kembali posisinya sebagai subyek politik. Upaya pengungkapan dan kehadiran mereka yang tidak dihitung dalam

demokrasi inilah yang disebut dengan politik (*politics*; politik dalam bahasa Rancière). Upaya inilah sebagai bentuk disensus dan deklasifikasi terhadap tatanan sistem yang telah mengklasifikasikan subyek di dalam sistem. Berdasarkan penjelasan mengenai konsep politik dan polis tersebut, lalu solusi bagi permasalahan ketidaksetaraan saat ini guna mencapai kesetaraan seperti yang diinginkan oleh setiap individu adalah dengan melakukan penentangan serta pendobrakan terhadap tatanan sistem yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan. Cara yang dapat dilakukan yaitu subyek ‘bagian yang tak memiliki bagian’ berada dalam posisi politiknya, untuk menyuarakan ketidaksetujuannya serta menentang tatanan sistem dan melakukan deklasifikasi.

3.4.1. Disensus Terhadap Sistem

Disensus merupakan jalan keluar bagi permasalahan ketidaksetaraan yang dapat mematahkan rezim partisi sosial dalam masyarakat karena disensus adalah manifestasi jarak sensibilitas. Disensus membuka celah yang tak terdamaikan antara politik dan polis. Karena jika memilih jalan konsensus, konsekuensi nantinya politik akan menyusut menjadi polis. Karena bahwasanya, esensi dari politik adalah disensus. Disensus terjadi ketika konflik-konflik antar setiap partisi tidak lagi dapat didamaikan. Disensus menjadi jalan untuk mencapai kesetaraan di dalam demokrasi, karena pada kondisi ini terjadi tindakan politik penentangan sebagai bentuk perlawanan dari polis. Politik berusaha untuk menghadirkan mereka yang tersingkirkan untuk kembali ambil bagian dalam demokrasi. Disensus sebagai tindakan yang aktif untuk mencapai kesetaraan menentang sistem yang terbentuk akibat kondisi yang terjadi antara yang memerintah dan yang diperintah. Melalui tindakan politik dari subyek ‘bagian yang tak memiliki bagian’ yang berusaha kembali hadir dan dihitung sebagai sebuah kesatuan yang utuh dalam masyarakat dengan identitas-identitas pribadi yang ada dalam dirinya. Bagi Rancière, setiap individu terlahir setara karena memiliki kemampuan dalam berpikir dan berbahasa, maka setiap subyek yang tersingkirkan sebenarnya memiliki kemampuan menerobos hierarki kelas yang memisahkan mereka dalam tembok partisi sosial.

“When people act out of the presupposition of equality, they engage in a dissensus from the police order that has acted to deny their equality.”

Universitas Indonesia

essence of politics is a dissensus,” he writes, explaining that, “Dissensus is not the confrontation between interests or opinions. It is the manifestation of a distance of the sensible from itself”

Ketika orang-orang bertindak keluar dari pengandaian kesetaraan. Mereka terlibat dalam disensus dari tertib polis yang bertindak menentang kesetaraan mereka. Ia menulis “Esensi dari politik adalah disensus”, untuk menjelaskannya, disensus bukanlah konfrontasi antara kepentingan atau pendapat. Ia adalah manifestasi jarak sensibilitas itu sendiri.⁴⁰

Disensus mengungkap apa yang tersembunyi akibat distribusi sensibilitas dalam sistem demokrasi, dengan cara berupaya menghadirkan kembali mereka – bagian yang tak memiliki bagian – yang tersingkirkan sehingga mereka dapat turut andil ambil bagian sebagai subyek politik untuk mematahkan sistem yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan. Melalui disensus ini juga demokrasi akan kembali berada dalam jalur yang benar karena tidak ada lagi skandal demokrasi yang membungkam suara mereka, karena disensus adalah tindakan politik yang berusaha mengajak subyek untuk berpolitik dan memberi makna pada kebebasan sebagai subyek yang setara. Jadi politik tidak lain juga merupakan penyelenggaraan dari disensus, atau yang disebut dengan perlawanan untuk menentang tatanan sistem yang memunculkan hierarki kelas dalam masyarakat. Perlawanan di atas merupakan upaya mematahkan hierarki dan partisi sosial yang memapankan ketidaksetaraan akan menjadi mungkin. Disensus inilah kiranya yang mesti kita jadikan agenda pokok politik demokrasi kontemporer, melalui disensus juga berarti mendorong dan membuka pintu yang selebar-lebarnya serta memberikan peluang yang disediakan oleh demokrasi justru bagi mereka yang sebenarnya paling membutuhkan, sehingga makna dari demokrasi pun demokrasi kembali ke jalur yang sebenarnya.

3.3.2. Deklasifikasi sebagai Wujud Disensus

Telah banyak negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi karena ia diharapkan mampu menampung dan mewujudkan keinginan setiap warganya demi mencapai sebuah kesetaraan. Pada kenyataannya saat ini meskipun demokrasi telah berjalan, proses yang dilalui untuk mencapai keadilan

⁴⁰May. op. cit. Hlm. 47.

tidaklah sesuai dengan makna demokrasi itu sendiri. Demokrasi dalam praktiknya hanya sebuah kata yang maknanya kian luntur akibat ulah mereka yang menganggap diri mereka lebih berkuasa. Contohnya, sudah hampir 14 tahun berjalannya demokrasi di Indonesia tak lantas menjamin kesetaraan bagi setiap masyarakatnya secara keseluruhan. Banyak terjadi kasus penyingkiran terhadap mereka yang dianggap tidak 'sama'. Seperti klasifikasi pada kelompok pekerja yang tidak mendapatkan haknya secara penuh, misalnya pada pekerja rumah tangga atau pekerja perempuan. Mereka yang dianggap tidak mampu bersaing dalam ranah publik tidak dihitung untuk sebuah kondisi yang menyembunyikan ketidaksetaraan. Demokrasi seharusnya menjadi sebuah sistem yang dapat mengatasi permasalahan ketidaksetaraan akibat adanya klasifikasi-klasifikasi di dalam sistem, karena prinsip utama daripada demokrasi yaitu mengutamakan kepentingan orang banyak, namun lagi-lagi keburukan demokrasi membagi tanggung jawabnya kepada semua pihak tetapi menyerahkan kesenangan dan semua fasilitas kemudahannya bagi segelintir subyek saja. Demokrasi pada saat ini memang mengakui adanya keragaman, tetapi masih tetap mengklasifikasikan dalam wilayah yang terkotak-kotak. Subyek tetap dikategorikan di dalam sistem demokrasi.

Mengatasi permasalahan di atas, perlu dilakukan deklasifikasi. Deklasifikasi membatalkan kewajaran suatu distribusi sensibilitas, penolakan terhadap posisi marjinal karena klasifikasi sebenarnya adalah ketidaksetaraan. Deklasifikasi adalah wujud dari disensus. Deklasifikasi memberi ruang yang dapat menerima perbedaan dalam artian perbedaan yang selalu memultiplikasi diri setiap ada satu 'kelainan' baru yang muncul. Setiap 'kelainan' baru yang muncul ini pasti tetap tidak mencukupi untuk menjadi naungan perbedaan dari masing-masing subyek yang sifatnya tidak terbatas. Deklasifikasi melakukan pendobrakan klasifikasi yang telah dibuat oleh praktik polis dari order yang ada dengan membuat klasifikasi baru yang menciptakan korsleting. Korsleting yang terjadi di dalam order karena order sebelumnya belum mengklasifikasikan klasifikasi yang ditawarkan oleh subyek.

Deklasifikasi ini berwujud menjadi 'migrasi' kelas, yang mana apabila politik adalah interupsi kepada tembok dan distribusi sensibilitas maka jelas

tujuan dari politik yang pertama adalah perubahan pada sistem tatanan. Dengan demikian yang dipentingkan dalam deklasifikasi adalah melakukan gerak atau migrasi dari status sosial (buruh atau borjuis misalnya) ke status sosial lainnya yang sekaligus menghancurkan tembok dan hierarki rezim sensibilitas tersebut. Dengan demikian, dalam kerangka politik ini, deklasifikasi juga merupakan suatu upaya terus-menerus untuk memeriksa dan menguak topeng konsensus yang diproduksi secara nyaman oleh polis. Migrasi kelas merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif dalam merebut kesetaraan. Berpartisipasi aktif tidak perlu dilakukan secara sadar, dan partisipasi aktif juga dapat berupa gerak kolektif, seperti perkataan Marx. Contohnya adalah tindakan demonstrasi untuk memprotes kebijakan yang telah atau akan diambil. Demonstrasi merupakan partisipasi aktif dan gerak kolektif. Inilah yang menjadi perbedaan antara deklasifikasi dengan migrasi kelas, yaitu bahwa migrasi kelas tidak mewakili satu kelas, migrasi kelas tidak hanya mewakili perorangan saja.

Jadi bahwasanya, identifikasi identitas yang dilakukan oleh distribusi sensibilitas dalam logika polisi (*policy of logic*) mengandaikan peletakkan subyek-subyek dalam identitas-identitas pada posisi ajeg yang mana di dalamnya tidak ada lagi ruang kosong. Setiap subyek dalam distribusi sensibilitas mendapatkan tempat identifikasi identitasnya, misalnya subyek A sebagai mahasiswi, subyek B sebagai pedagang, dan subyek C sebagai penggemar, dan lain-lain. Setiap subyek dalam order pasti sudah diidentifikasi dalam distribusi sensibilitas, dan *political subjectivity* mendobrak identifikasi yang dilakukan oleh distribusi sensibilitas. *Political subjectivity* sebagai yang pertama saat ini dan hanya sekejap merupakan momen partisipasi aktif, dimana ia mengidentifikasi dirinya sebagai identitas baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasikan oleh distribusi sensibilitas lalu mendeklasifikannya. Deklasifikasi juga bukan hanya pendobrakan terhadap klasifikasi saja, tetapi juga sekaligus membuat klasifikasi baru, karena hasil deklasifikasi pada akhirnya diklasifikasikan oleh distribusi sensibilitas.

Demokrasi memang sebuah sistem politik konsensus karena kemampuannya mengatasi konflik pluralisme. Meskipun demikian, demokrasi juga membuka celah bagi politik disensus. Hal ini adalah sebuah paradoks, yang oleh karena itulah, politik itu adalah sebuah proses tanpa akhir karena

kesempurnaan konsensual yang diidealkan tidak akan pernah sungguh tercapai. Dengan begitu, seperti pada Rancière, proses penyetaraan – yang disebutnya sebagai *democracy as active equality* – itu memang sebuah proses yang berketerusan takkan kunjung selesai, sebuah proses *disagreement* atau *articulative dissensus* berkelanjutan yang akan selalu menciptakan konflik. Pluralisme tanpa konflik bukanlah pluralisme, dan demokrasi sebagai sistem politik yang mampu mengatasi konflik di dalamnya ini pun juga menyediakan ruang berkonflik. Oleh karena itu pula para pemikir kontemporer tidak mempercayai demokrasi sebagai proses konsensus, melainkan sebaliknya demokratisasi sebagai proses disensus; yakni ketika sebuah perbedaan menginterupsi proses politik *status quo* (politik yang 'umum' yang disebut Rancière dengan sebutan '*the police*') lewat sebuah artikulasi disensus. Politik tidak berhenti pada pertentangan saja, tetapi juga melalui tindakan aktif sebagai subyek politik untuk merebut kembali posisinya di dalam sistem dengan cara melakukan migrasi kelas. Migrasi kelas untuk mematahkan partisi sensibilitas, yang mana di dalam partisi sensibilitas selalu ada yang tercecceh dan tidak pernah seutuhnya dihitung. Ketika partisi sensibilitas menyertakan subyek secara utuh maka politik selesai, karena selalu ada yang tercecceh itulah maka *political subjectivity* pun akan selalu ada. Jadi pada galibnya, konflik antara polis dan politik di dalam sistem bersifat infinitum, tidak akan pernah selesai.

Bab IV

PENUTUP

Pemikiran tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia pada hakekatnya merupakan gambaran asumsi tentang manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai macam keinginan, oleh karena itu mereka saling tolong menolong walaupun ada beberapa perbedaan di antara masing-masing individu. Perbedaan mendasar tersebut menjadi pluralisme yang pada akhirnya mencoba disatukan dalam sebuah bentuk kesatuan melalui demokrasi, dan memberi pengaruh kepada negara serta kehidupan bermasyarakat. Dengan semakin beranekaragamnya masyarakat dan budaya di dalamnya, sudah tentu masing-masing individu masyarakat memiliki keinginan yang berbeda-beda, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan konflik ketidaksetaraan. Rancière telah menjelaskan apa yang ia maksud dengan kesetaraan di dalam filsafat politiknya, perbedaannya hanya terletak apakah sang subyek atau kelompok tersebut mau untuk tetap mempertahankan serta mengembangkan intelegensinya dalam mengambil perannya secara aktif untuk melakukan politik disensus. Kesetaraan bagi Rancière bukanlah sebagai tujuan, namun kesetaraan berarti merebut kembali posisi serta perannya yang aktif di dalam sistem. Subyek ‘bagian yang tak memiliki bagian’ ini berpartisipasi aktif di dalam sistem melalui politik demokrasi disensus ini diharapkan mampu mematahkan kerasnya distribusi sensibilitas yang ada dalam masyarakat. Sehingga dengan politik demokrasi disensus ini pula dapat mencegah terjadinya ‘kesalahan hitung’ sebagai akibat dari praktik-praktik polis yang menyingkirkan subyek ke dalam ‘bagian yang tak memiliki bagian’ di dalam masyarakat pluralis demokrasi.

4.1. Kesimpulan: Demokratisasi Masyarakat ‘bagian yang tak memiliki bagian’

Sistem pemerintahan demokrasi ini diterapkan pada kondisi masyarakat yang pluralis diharapkan mampu mengatasi konflik yang terjadi di dalamnya,

yang namun pada kenyataannya praktik-praktik politik membuat subyek atau kelompok yang lemah menjadi tersingkirkan. Maka Rancière menghadirkan politik (*politics*) sebagai lawan dari polis, dimana dalam tindakannya, politik diharapkan mampu membuat disensus di dalam masyarakat, agar subyek atau kelompok yang tersingkirkan dan masuk ke dalam lubang ‘bagian yang tak memiliki bagian’ dapat hadir kembali ke dalam sistem. Mereka – bagian yang tak memiliki bagian – hadir kembali dengan maksud agar dapat mematahkan rezim kekuasaan para penguasa dari praktik-praktik politik yang salah. Mereka kembali merebut kesetaraan yang dituntutnya sebagai akibat dari kondisi ketidaksetaraan yang selama ini dirasakan, karena praktik-praktik polis telah membuat sistem demokrasi keluar dari jalur yang sebenarnya, yang mana tidak lagi menghitung masyarakat secara keseluruhan melainkan menghitung masyarakat yang telah disterilisasi.

Mengaktifkan kesetaraan berarti subyek berada dalam posisi politiknya untuk bertindak mengintervensi tatanan struktur, sehingga demokrasi hendaknya kembali ke jalan yang sebenarnya menjadi sistem pemerintahan yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan atas, menengah, hingga kalangan bawah. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mana selama ini sistem demokrasi menjadi pemerintahan ‘rakyat’ yang telah distrelisasi. Oleh karena itulah, dengan adanya disensus berarti subyek atau kelompok yang merasakan ketidaksetaraan telah melakukan usahanya untuk memperjuangkan kesetaraan. Melakukan politik disensus berarti subyek melakukan penentangan terhadap sistem tatanan guna merebut kembali peran serta posisinya dalam masyarakat. Disensus yang berwujud pada deklasifikasi, yang mana bertujuan untuk mendobrak klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, hal tersebut juga berarti subyek telah melakukan migrasi kelas.

4.2. Sumbangan Teori Terhadap Situasi di Indonesia

Bahwasanya seiring berjalannya waktu pengertian pluralisme telah banyak mengalami perkembangan ini menjadi akibat dari perubahan zaman, dan pada kenyataannya saat ini pun juga mengikuti kepentingan dari beberapa golongan. Salah satunya mereka yang mengartikan pluralisme sebagai identitas kultural,

kepercayaan dan agama harus disesuaikan dengan zaman moderen. Pengertian di atas, kondisinya jelas tidak berlaku untuk negara Indonesia, dimana kebhinekaan merupakan salah satu pedoman bangsa. Beragamnya suku bangsa dan agama di Indonesia jelas akan sangat mengganggu dan bisa menimbulkan konflik yang hanya berlandaskan emosi, karena penduduk Indonesia untuk saat ini sangat mudah terpengaruh oleh suatu informasi tanpa mau mengkaji kebenarannya lebih dalam. Melihat pedoman dari bangsa Indonesia yaitu *Bhineka Tunggal Ika*, yang mempunyai pengertian berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mengingatkan kita betapa pentingnya pluralisme untuk menjaga persatuan dari kebhinekaan bangsa, asalkan pengertian pluralisme adalah toleransi, yang mana pedoman tersebut tercantum pada lambang Negara kita yang didalamnya telah terangkum dasar Negara kita juga.

Semakin beranekaragamnya masyarakat dan budaya, sudah tentu setiap masing-masing individu masyarakat memiliki keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda yang bisa menimbulkan konflik antar subyek. Pluralisme yang mengacu kepada pengertian toleransi untuk mempersatukan kebhinekaan suatu bangsa, dan memang di dalam masyarakat pluralis, konflik-konflik tersebut tidak akan pernah terselesaikan. Pluralisme moral adalah titik berdiri konsep di mana orang percaya bahwa kebenaran atau membenaran dari penilaian moral tidak mutlak, tetapi relatif terhadap beberapa kelompok orang yang berbeda. Sehingga untuk beberapa pertimbangan menuju ke ketidaksepakatan tertentu yang diusulkan oleh orang-orang dari budaya yang berbeda dan masyarakat yang berbeda pula ini tidak salah. Orang-orang dari daerah yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, struktur sosial, dan karakter yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda dengan cara berpikir dalam menghadapi hidup dan masalah mereka sendiri. Karena itulah, di dalam masyarakat pluralis tidak membatasi ideologi seseorang. Setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya, dan ini juga telah tertuang di dalam UUD 1945 di Indonesia.

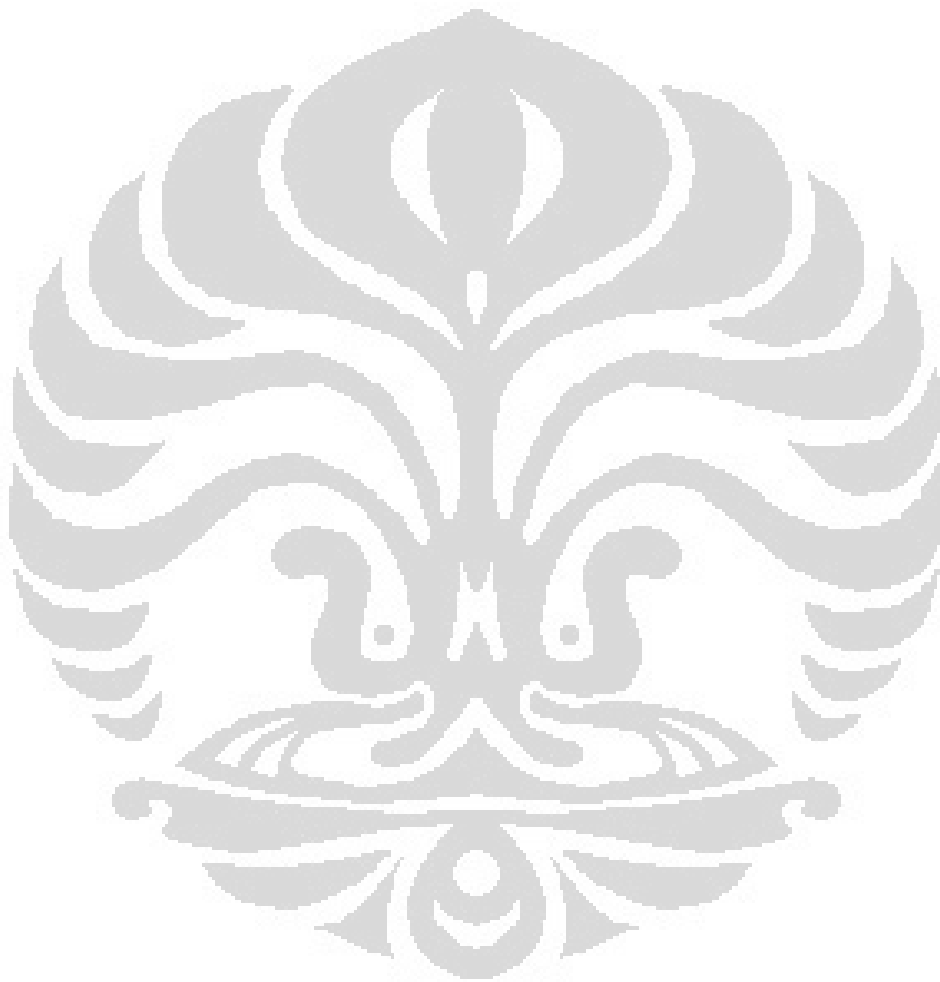
Melalui konsep Jacques Rancière yang penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, diharapkan dapat membangun kembali semangat subyek atau kelompok yang tersingkirkan dari sistem untuk kembali ambil bagian berpartisipasi sebagai warga negara seutuhnya tanpa pembatasan hak-hak yang

seharusnya diterima. Melalui kemampuan berpikir dan berbahasa yang dimiliki oleh setiap individu mendorongnya berpartisipasi aktif untuk dapat mendobrak rezim yang berlaku selama ini. Rezim yang telah menrenggut kesetaraan sebagai modal awal yang telah dimiliki oleh masing-masing individu sebagai subjek masyarakat. Adanya keinginan yang kuat dalam diri setiap subyek untuk menggunakan kemampuannya dalam berpikir dan berbahasa guna mempertahankan kesetaraan melalui praktik-praktik politik sebagai bentuk penentangan terhadap sistem untuk mematahkan rezim partisi inilah yang diharapkan dapat mengembalikan demokrasi untuk tetap mempertahankan kondisi kesetaraan di dalam masyarakat pluralis, khususnya di Indonesia

4.3. Refleksi Kritis

Jadi bahwasanya demokrasi tentu harus dipahami sebagai sistem pemerintahan yang dapat mengakomodir konflik yang terjadi dalam masyarakat pluralis modern saat ini, karena memilih sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berlaku pun tentu bukan tanpa alasan. Demokrasi berhasil menciptakan kondisi kesetaraan di dalam masyarakat pluralis bila mengikutsertakan setiap subyek secara keseluruhan yang mengalami penyingkiran dari sistem untuk kembali menduduki peran serta posisinya yang aktif sebagai warga negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan pro rakyat, tentu saja, rakyat lah yang memegang tampuk kekuasaan. Setiap subyek atau kelompok yang mengalami penyingkiran dari sistem karena ulah segelintir pihak yang ingin mengambil keuntungan ini harus kembali dihadirkan agar 'kesalahan hitung' tidak lagi terjadi. Sehingga sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang merangkul seluruh lapisan masyarakat agar konflik-konflik yang rentan terjadi di dalam masyarakat pluralis dapat dikelola dengan baik tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Melalui politik demokrasi disensus ini juga diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga kesetaraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang beranekaragam. Politik demokrasi disensus dilakukan sebagai bentuk perjuangan akan kesetaraan aktif, karena bila tetap mempertahankan politik demokrasi konsensus maka kesetaraan yang diterima bersifat pasif. Dalam penerapannya sendiri, diharapkan

pemahaman akan politik demokrasi dapat dibenahi, melakukan peninjauan ulang kembali pada hukum serta kebijakan yang berlaku sehingga tidak lagi membatasi hak-hak serta kepentingan dan kebebasan subyek lain.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer :

Rancière, Jacques. *Dis-agreement: Politics and Philosophy*. Terj. Julie Rose. Minnesota: University of Minnesota Press, 1999.

_____ *Dissensus: on Politics and Aesthetics*. New York: Continuum, 2010

_____ *On The Shore of Politics*. London: Verso, 1992.

_____ *The Politics of Aesthetics: The Distribution of The Sensible*, translated by Gabriel Rockhill. London: Continuum, 2004.

Sumber Sekunder :

Adian, Donny Gahral. *Demokrasi Substansial; Risalah Kebangkitan Liberalisme*. Penerbit Koekoesan: Depok, 2010.

Henry, Hardy., ed. *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas*. London: Knopf, 1990.

Bobbio, Norberto. *Liberalism and Democracy*. London; Verso, 1990.

Bunnin, Nicholas, dan Jiyuan Yu. *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.

Danujaya, Budiarto. *Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Davis, Oliver. *Jacques Rancière: Key Contemporary Thinkers*. UK: Polity Press, 2010.

Hardiman, F. Budi, dkk. *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta: www.srimulyani.net, 2010

May, Todd. *The Political Thought of Jacques Rancière: Creating Equality*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2008.

Rescher, Nicholas. *Pluralism: Against the Demand for Consensus*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Robert, Audi., ed. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. New York: Cambridge University Press, 1999.

Schmitt, Carl. *The Concept of The Political*. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.

Sumber Artikel atau Jurnal Online :

Hamington, Maurice. "*Jane Addams (1860 - 1935)*"

<http://www.iep.utm.edu/addamsj/#SH2c> (6 Juni 2012)

"*Democracy*". <http://plato.stanford.edu/entries/democracy/> (25 Juni 2012)

